

DIMENSI ETNIK DALAM KEHIDUPAN POLITIK: Studi Tentang Preferensi Tokoh Etnis Dalam Pemilihan Walikota Pontianak

*Ethnic Dimension in Political Life:
A Study on Ethnic Preference in the Election of Pontianak Mayor*

Eka Hendry Ar. (Penanggungjawab merangkap Anggota)

M. Rahmatullah (Ketua merangkap Anggota)

Hermansyah (Anggota)

Segu (Anggota)

Suhaimi (Anggota)



**DIMENSI ETNIK DALAM KEHIDUPAN POLITIK:
STUDI TENTANG PREFERENSI TOKOH ETNIS DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA PONTIANAK**

*(Ethnic Dimension in Political Life : A Study on Ethnic Preference
in Election of Pontianak Mayor)*

EKA HENDRY AR.
(Penanggung Jawab Merangkap Anggota)

M. RAHMATULLAH
(Ketua Merangkap Anggota)

HERMANSYAH
(Anggota)

SUHAIMI
(Anggota)

SEGU
(Anggota)



**CENTER FOR ACCELERATION OF INTER-RELIGIOUS
AND ETHNIC UNDERSTANDING (CAIREU)**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PONTIANAK
TAHUN 2008**

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**DIMENSI ETNIK DALAM KEHIDUPAN POLITIK:
Studi Tentang Preferensi Tokoh Etnis
Dalam Pemilihan Walikota Pontianak**

*Ethnic Dimension in Political Life:
A Study on Ethnic Preference in the Election of Pontianak Mayor*

Eka Hendry A. (Penanggungjawab Merangkap Anggota)
M. Rahmatullah (Ketua Merangkap Anggota)
Hermanyah (Anggota)
Sagu (Anggota)
Suharni (Anggota)



CENTER FOR ACCELERATION OF INTER-RELIGIOUS AND ETHNIC UNDERSTANDING
(CADEP) STAMBO PONTIANAK TAHUN 2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat keragaman budaya yang cukup tinggi, baik dari segi keragaman kelompok etnis, agama dan corak budaya masing-masing etnis dan agama tersebut. Keragaman tersebut seyogyanya menjadi kekayaan bagi daerah, disamping kekayaan alam yang dimiliki Kalimantan Barat. Namun kenyataannya, dari keragaman tersebut telah timbul beberapa kali konflik sosial yang melibatkan beberapa kelompok etnis. Menurut catatan resmi polisi daerah Kalbar (1999) bahwa, antara tahun 1963 hingga 1999 paling tidak telah terjadi kurang lebih 12 kali konflik lokal antara kelompok etnis di Kalbar. (Al Qadrie, 2002:169; Hendry, 2003:201; Munawar, 2003:3-4; Marzali in Stokhof and Djamal, 2003: 15).

Meskipun kekerasan dalam konflik Sambas – yang nota bene dianggap sebagai konflik yang paling besar – telah berakhir, namun status konflik tersebut masih pada tarap *simmering*, yaitu belum terselesaikan akar konfliknya. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak boleh kembalinya orang Madura ke Sambas. Masih tumbuh prasangka dan dendam kesumat di antara kedua belah pihak yang bertikai.

Kondisi *simmering* konflik tersebut tidak jarang dimanfaatkan oleh para elit politik untuk mencapai tujuan praktis politiknya. Sentimen konflik dan sentimen kesukuan dipakai untuk mendulang perolehan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik Gubernur maupun Bupati/Walikota. Dalam kasus Pemilihan Gubernur misalnya, Gubernur terpilih (Cornelis) yang nota bene dari etnis Dayak dan pasangannya (Christiandi) dari etnis Tionghoa “memanfaatkan” isu mengembalikan pengungsi Madura ke Sambas sebagai strategi untuk mendapat dukungan dan simpati dari etnis Madura. Kemudian, dalam konstelasi yang lebih makro, pertimbangan-pertimbangan keterwakilan

etnis masih menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mendulang suara, disamping faktor-faktor lain seperti agama, ketokohan dan dukungan “finansial”. Oleh karenanya, kondisi terakhir yang dapat kita saksikan di Kalbar, pada saat momentum Pilkada dan Pilgub maka bermunculanlah lembaga-lembaga Paguyuban yang menjadi pendukung salah satu pasangan dari etnis paguyuban tersebut.

Menurut hemat peneliti, kondisi ini lambat laun akan berdampak terhadap “penguatan” potensi konflik sosial. Konflik-konflik tersebut memang atas nama konflik politik yang bersifat pragmatis dan temporal. Namun, ketika isu-isu kesukuan dan agama yang digunakan maka konflik yang akan terjadi tidak akan sesederhana konflik politik praktis. Kalau hal tersebut sempat terjadi, maka Kalimantan Barat akan sulit bergerak maju mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya.

Pemanfaatan isu agama dan etnis tampaknya akan tetap menjadi trend dalam beberapa agenda politik dalam waktu dekat, seperti Pemilihan Walikota Pontianak, Pemilihan Bupati Sanggau, Kubu Raya dan Kabupaten Pontianak, yang akan diadakan serempak pada tanggal 25 Oktober 2008. Beberapa kalangan menilai bahwa, kemenangan Cornelis dan Christiadi (masing-masing dari etnis Dayak dan Cina) menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, mengalahkan tiga calon lainnya dari etnis Melayu, dinilai masih meninggalkan residu konflik. Dalam konteks Kota Pontianak, salah satu kasus yang sering dirujuk sebagai bentuk “*test case*” dari “kekecewaan” tersebut adalah yang populer dengan kejadian Gang 17, yaitu konflik kekerasan antara orang-orang Melayu (dan Arab) dengan Cina. Konflik ini juga dinilai meninggalkan residu, terlebih lagi dalam penetapan calon tetap Pilwako Kota Pontianak, setidaknya ada 3 orang calon dari etnis Cina. Satu orang menjadi calon Walikota, dan dua lainnya, menjadi calon wakil walikota.

Namun, dalam konteks penelitian ini, kami tidak hanya melokalisir potensi konflik tersebut pada wilayah tersebut, karena berdasarkan pengalaman-pengalaman proses politik (Pilkada) sebelumnya, selalu saja terjadi berbagai

macam konflik, pada setiap tahapan proses Pilkada. Konflik yang kami maksudkan dalam konteks penelitian ini, tidak semata konflik kekerasan, akan tetapi semua bentuk konflik (conflicting situation) yang terjadi dalam proses Pilkada.

Penelitian ini akan difokuskan pada kasus Pemilihan Walikota (Pilwako) Kota Pontianak, karena pertimbangan keterbatasan waktu dan sumber pendanaan. Disamping itu juga, kota Pontianak memiliki nilai yang paling strategis, karena merupakan "barometer" perkembangan Kalbar (karena sebagai ibukota Propinsi Kalbar) dan suhu politiknya diyakini akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.

B. Masalah Penelitian

Masalah utama dari penelitian ini adalah, konflik politik seperti apa yang terjadi dalam proses Pilwako Pontianak. Berdasarkan masalah utama tersebut akan dijabarkan lagi dalam beberapa pertanyaan penelitian, sebagaimana berikut:

1. Bagaimana peran tokoh etnis dalam pemilihan wali kota ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tokoh etnis dalam menentukan pilihan terhadap calon wali kota ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menemukan sekaligus mendeskripsikan potensi konflik politik pada pemilihan Walikota Pontianak. Selanjutnya tujuan umum tersebut dapat dijabarkan menjadi tujuan khusus sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui peran tokoh etnis dalam proses pemilihan Walikota Pontianak.
2. Ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tokoh etnis dalam menentukan pilihan terhadap calon wali kota

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Memberi gambaran tentang potensi konflik politik pada pemilihan Walikota Pontianak sehingga dapat dijadikan acuan bagi masyarakat dan pemerintah upaya untuk mencegah dan atau meminimalisir konflik dan potensinya.
2. Memberi masukan pada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung dalam melaksanakan Pilkada, sehingga potensi konflik politik yang mungkin akan terjadi dapat dinetralisir atau diminimalisir.
3. Memberi masukan pada Center for Acceleration of Inter Religious and Ethnic Understanding (CAIREU) dalam membangun data base tentang konflik dan potensi konflik secara institusional dan melakukan kajian-kajian khusus tentang konflik dan potensi konflik untuk mencari model-model terbaru antisipasi dan penyelesaian konflik.
4. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya yang ingin mengkaji lebih mendalam untuk memperoleh perbandingan sehingga memperkaya temuan-temuan penelitian ini.

E. Landasan Teoritik dan Kerangka Konseptual Penelitian

1. Peran Elit Dalam Proses Politik

Menurut Alfian Alfian (Dalam Pelita, 2007) studi tentang pendekatan elite sudah populer dikenal dalam kajian-kajian sosiologi-politik. Dengan mengutip T.B. Bottomore dalam bukunya berjudul "*Elite and Society*" bahwa, term elit telah digunakan pada abad ke-17 untuk menggambarkan barang-barang dengan kualitas yang sempurna. Penggunaan kata itu kemudian diperluas untuk merujuk kelompok-kelompok sosial yang unggul, misalnya unit-unit militer kelas satu atau tingkatan bangsawan yang tinggi. Atau dalam konteks Indonesia, menurut Saurip Kadi (dalam Kompas, 2001) bahwa, istilah elite sering digunakan untuk menyebut pihak yang memiliki akses untuk melaksanakan perubahan sosial dan politik

dalam suatu negara. Vilfredo Pareto (akhir abad 19 M), Gaetano Mosca (1930-an) adalah diantara tokoh yang mempopulerkan kajian tentang elit.

Menurut Pareto (dalam Alfian Alfian, 2007) bahwa, setiap cabang kegiatan manusia, setiap individu "memiliki kapasitas" yang berbeda-beda. Yang memiliki "indeks tertinggi" dalam cabang kegiatan masing-masing, maka itulah elite. Dengan kata lain mereka yang mampu berdiri di pucuk piramida cabang kegiatan tersebut itulah pada hakekatnya kaum elit. Kaum elit dapat memainkan peran ganda, peran positif maupun negative, seperti ditulis oleh Clive Bell (dalam Alfian Alfian, 2007) dalam bukunya *Civilization* bahwa, dalam sebuah masyarakat yang beradab, elit dapat memerankan dua sisi, pertama sisi yang positif dan juga peran negative. Masyarakat yang beradab menurut Bell ditandai oleh penalaran dan nilai-nilai, dan kualitas-kualitas tersebut ditanamkan dan dipelihara oleh kaum elit. Kemudian sebaliknya, peradaban juga bisa hancur manakala elit bertindak sebaliknya.

Tentu terma elit ini akan senantiasa berkembang, tidak semata dalam konteks elit politik atau elit kekuasaan, akan tetapi juga berkembang dalam konteks kebudayaan seperti elit kebudayaan, elit etnis dan termasuk pula elit keagamaan. Seperti peran kyai di Jawa sebagai elit kebudayaan atau istilah C. Geertz (1963) *Cultural Broker*, dalam tulisan Geertz dan Hiroko Horikoshi, 1987. (dalam Agus Salim (peny), 2001) Peran para elit ini tentu saja dominant, terlebih lagi dalam masyarakat yang paternalistik seperti Indonesia, peran pemimpin, baik pemimpin politik maupun kebudayaan sangat diperlukan. Meskipun ia mengalami pasang surut, kadang peran tersebut di tengah, kadang ia bergeser ke pingiran. Seperti hasil penelitian Sunyoto Usman (1991) tentang pergeseran peran elit (lebih marginal) keagamaan dalam masyarakat di Jawa. Tapi, tetap saja peran-peran pemimpin kebudayaan ini tetap hidup dalam masyarakat. Tidak terkecuali pada masyarakat Kalimantan Barat. Peran-peran tokoh etnis sangat

menonjol, terutama dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat dan termasuk juga dalam momentum-momentum politik praktis.

2. Pendekatan Prilaku Pemilih Dalam Proses Politik.

Berbicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi pemilih biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sosiologis, budaya, struktural maupun psikologis. Scott C. Flanagan (1991), David Denver (1989), Gerald Pomper (1978) dan Seymour Martin Lipset (1981) adalah para tokoh yang mendukung pandangan bahwa, faktor sosiologis dan budaya merupakan faktor yang mempengaruhi prilaku pemilih. Sedangkan Angus Campbell (1976) lebih melihat faktor psikologis (seperti pengetahuan, sikap dan kepercayaan terhadap kandidat) sebagai faktor dominan yang mempengaruhi prilaku pemilih. Kemudian Ian Mc Allister (1992) dalam bukunya *Political Behaviour: Citizen, Parties, and Elites in Australia* berpandangan bahwa, faktor struktural (kedekatan kelas sosial-ekonomi, desa-kota) dan faktor ekologi (kedekatan karakteristik wilayah pedalaman, pesisir, pertanian dlsb) sebagai faktor dominan yang mempengaruhi prilaku pemilih. Ini berdasarkan hasil riset yang dilakukannya terhadap prilaku pemilih di Australia. Sedangkan Richard Niemi dan Herbert F. Weisbergg (1984) dalam bukunya *Controversies of Voting Behaviour* memperlihatkan bahwa, kecenderungan perilaku pemilih di beberapa negara bagian Amerika adalah pemilih yang rasional, cenderung pragmatis dan ekonomis. (Syafarudin, 2008). Dalam kenyataannya, boleh jadi prilaku pemilih tidak semata didasarkan pada satu variabel saja, akan tetapi boleh jadi beberapa faktor bekerja sekaligus.

Dalam kaitannya dengan faktor pertimbangan etnis, ini termasuk kepada faktor sosiologis dan budaya. Sebagaimana hasil studi yang dilakukan oleh Aris Ananta dkk (2004) (dalam Syafaruddin, 2008) menunjukkan bahwa, etnis adalah salah satu penjelas dalam prilaku pemilih di Indonesia. Namun, penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Saiful

Mujani dan William Liddle (2004-2007) malah menunjukkan hasil yang sebaliknya, bahwa, etnis bukanlah variabel penting dalam menentukan pilihan pemilih. Faktor karakteristik wilayah diduga juga turut memberikan kontribusi terhadap perbedaan intensitas isu etnis ini sebagai faktor yang menentukan pilihan.

Berdasarkan hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (dalam Syafaruddin, 2008) tentang Faktor Etnis dalam Pilkada, di Tiga Provinsi (Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Bangka Belitung). Riset ini menunjukkan bahwa, ada perbedaan antara ketiga wilayah tersebut terkait dengan sentimen etnis dalam pemilihan. Pilkada di Kalimantan Barat memperlihatkan bahwa, faktor etnis memainkan peran yang sangat penting. Sementara di dua daerah lainnya, sentimen etnis relatif lebih kecil. Sentimen etnis dianggap sebagai perilaku politik yang tidak rasional. Oleh karenanya, berbagai kalangan berupaya mengerakkan pendulum ini, dari kecenderungan preferensi tidak rasional menjadi lebih rasional.

Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) dianggap sebagai teori yang relevan dalam penelitian tentang *political behavior*. Teori ini memusatkan perhatian pada aktor, karena aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan dan maksud yang tertuju pada upaya untuk mencapai apa yang mereka inginkan.

Dalam sosiologi teori ini dipopulerkan oleh James Coleman. Menurutnya bahwa teori pilihan rasional merupakan “tindakan rasional” dari seorang individu atau aktor untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Bentuk turunannya dari pilihan politik menurut Dan Nimmo adalah dengan pemberian suara. Nimmo mengelompokkan pilihan tersebut dalam empat kategori yaitu; pertama, pemberian suara rasional, yaitu proses penentuan pilihan tidak semata didasarkan pada atau hanya untuk kepentingan pribadi tetapi lebih mempertimbangkan pada kepentingan umum. Kedua, Pemberian suara reaktif adalah proses penentuan pilihan lebih dikarenakan

ikatan emosional dengan seseorang atau partai pengusung. Ketiga, Pemberian suara responsif, yakni proses penentuan pilihan menurut Pomper bersifat *impermanent* atau tidak tetap, karena ia dapat berubah (sesuai situasi dan kepentingan). Kemudian yang terakhir adalah Pemberian suara aktif, yaitu proses penentuan pilihan dengan keterlibatan aktif untuk melakukan interpretasi terhadap peristiwa, isu, partai, dan personalitas, sehingga penetapan, menyusun serta menerima serangkaian pilihan yang diberikan¹.

Kecenderungan pemilih yang mengedepankan sentimen etnis dapat dikategorikan dalam beberapa pertimbangan tersebut. Karena menyangkut sikap rasional atau tidak itu sangat relatif kita melihatnya. Kemudian, pilihan terhadap sentimen etnis juga boleh jadi timbul sebagai bentuk respon terhadap situasi yang berkembang, sehingga seseorang atau sekelompok orang dapat saja secara cepat berubah-ubah sikap politiknya. Terlepas dari perbedaan perspektif yang dapat saja muncul dalam membaca teori-teori tersebut, yang jelas teori-teori yang dikemukakan hemat peneliti telah memadai untuk menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam preferensi politik, baik di tingkat elit maupun pemilih *grass root*.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif. Ada beberapa alasan mengapa digunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Pertama, penelitian ini dimaksudkan untuk memahami permasalahan yang timbul dan interaksi sosial dalam *setting* alamiahnya, dan menginterpretasikan fenomena ini berdasarkan pengamatan dan pemaknaan yang diberikan informan.

Kedua, realita bersifat multidimensi dan merupakan akibat dari kompleksitas situasi yang beragam. Oleh karena itu, kajian terhadap

¹ Ambo Upe, (2008), *Sosiologi Politik Kontemporer*, hal. 113

sebuah fenomena harus dilakukan dengan menganalisa konteks yang mengitarinya, dan ini hanya mungkin dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

2. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di kota Pontianak. Kota Pontianak merupakan Ibukota Propinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan dan terbagi menjadi 29 (dua puluh sembilan) kelurahan dengan luas 107,82 km². Kota Pontianak terletak pada Lintasan Garis Khatulistiwa dengan ketinggian berkisar antara 0,10 meter sampai 1,50 meter diatas permukaan laut.

Kota Pontianak dipisahkan oleh Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak dengan lebar = 400 meter, kedalaman air antara 12 s/d 16 meter, sedangkan cabangnya mempunyai lebar 250 meter. Dengan demikian Kota Pontianak terbagi atas tiga belahan yakni :

- Belahan Utara dengan Kecamatan Pontianak Utara
- Belahan Timur dengan Kecamatan Pontianak Timur
- Belahan Selatan dengan Kecamatan Pontianak Selatan
- Belahan Barat dengan Kecamatan Pontianak Barat
- Belahan Tenggara dengan Kecamatan Pontianak Tenggara
- Bagian Kota dengan Kecamatan Pontianak Kota

Penelitian ini dilakukan pada 6 (enam) kecamatan. Penduduk kota Pontianak terdiri dari berbagai etnis, yaitu Melayu, Tionghoa, Jawa, Bugis, Dayak dan lainnya. Demikian pula para kandidat calon walikota Pontianak yang berjumlah 7 (tujuh) pasangan. Calon-calon tersebut berasal dari beberapa etnis, misalnya : Melayu berpasangan dengan Melayu, Melayu berpasangan Tionghoa, Melayu berpasangan dengan Madura, dan Tionghoa berpasangan dengan Bugis. Dari 7 (tujuh)

pasangan calon walikota Pontianak, 6 (enam) pasangan calon walikota beragama Islam (Muslim) dan 1 (satu) calon beragama Konghuchu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu manusia/orang dan bukan manusia. Sumber data sebagai subyek dan informan kunci (*key informants*). Sedangkan sumber data bukan manusia berupa dokumen yang relevan dengan masalah penelitian, seperti gambar, foto, koran, majalah, tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 (tiga) teknik yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi, wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus. Observasi dilakukan secara non partisipan, di mana peneliti berperan hanya sebagai pengamat fenomena yang sedang diteliti. Teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang kondisi obyektif dari masyarakat yang diamati, lingkungan social, serta perilaku subyek penelitian berkaitan dengan potensi konflik politik.

Sedangkan wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara dilaksanakan terhadap informan. Informan utama dalam penelitian ini tokoh-tokoh etnik yang ada di kota Pontianak khususnya, tokoh etnik asal kandidat yang bertarung dalam Pilwako Pontianak tahun 2008. Selain itu, tokoh etnik lain yang tidak terlibat dalam Pilwako juga diwawancarai sebagai pembanding. Penentuan informan didasarkan atas pertimbangan usia tua dan muda.² Untuk menghindarkan bias jender, pemilihan informan juga didasarkan jenis kelamin. Diskusi kelompok dilakukan secara terpisah sesuai dengan tempat tinggal dalam kecamatan dan dibagi berdasarkan etnis.

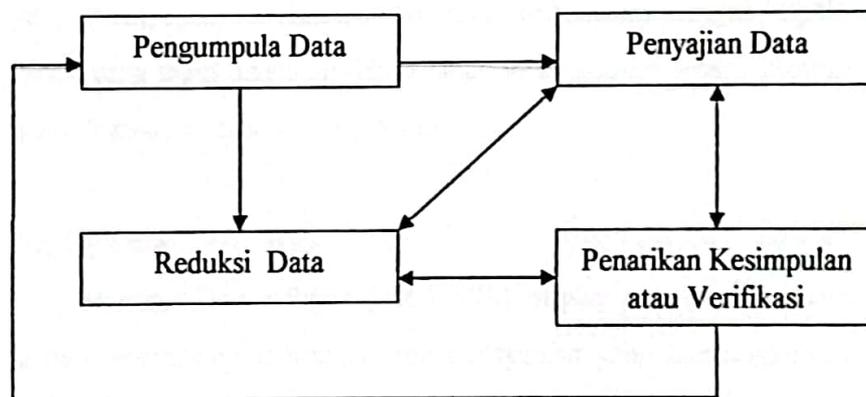
² Usia 40 tahun ke atas digolongkan tokoh tua dan 40 tahun ke bawah digolongkan tokoh muda.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah data dikumpulkan. Ada beberapa model teknik analisis data yang dikemukakan pada pakar peneliti.

Menurut Miles dan Huberman (1984, dikutip dari Rasyid, 2000: 120) analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Model ini juga digambarkan oleh Harun Rasyid dalam bukunya sebagai berikut :

Bagan 1
Analisis Data Model Interaktif



(Harun Rasyid, 2000 : 70)

Tahapan-tahapan model analisis data interaktif yang akan dilakukan sebagai berikut :

a. Analisis Selama Pengumpulan Data

Selama kegiatan pengumpulan data berlangsung, peneliti akan melakukan analisis terhadap data-data yang terkumpul. Peneliti mulai

memisahkan antara data atau jawaban sesuai dengan pertanyaan penelitian (fokus) dan yang tidak sesuai.

Data yang sesuai dengan pertanyaan penelitian (fokus) akan dikelompokkan tersendiri sebelum dilakukan reduksi dan sebagainya, sedangkan data yang tidak sesuai akan diarsipkan atau disimpan, dan mungkin saja data tersebut akan dapat digunakan nantinya.

b. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan terus menerus selama penelitian kualitatif berlangsung (Harun Rasyid, 2000 : 70). Hal ini dimaksudkan agar diperoleh gambaran yang tajam dan memudahkan peneliti dalam pengkodean.

Data yang diperoleh di lapangan ditulis dalam bentuk uraian yang merupakan rangkuman dan hasil wawancara dengan aspek-aspek yang ingin diketahui. Hasil rangkuman disusun secara sistemis dan difokuskan pada hal yang penting.

c. Display Data

Menurut Harun Rayid (2000 : 70) display atau penyajian data adalah seperangkat informasi yang terorganisir yang memungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Penyajian data yang lebih terfokus dapat berbentuk ringkasan tersruktur, sinopsis, sketsa, kerangka, diagram, atau matriks-matriks dengan teks.

Dengan demikian, display data atau penyajian data ditujukan untuk menampilkan data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, sehingga membantu peneliti dalam menemukan pola-pola atau hubungan antara satu dengan lainnya. Hal ini dilakukan dengan

membuat ringkasan terstruktur, matriks, sketsa-sketsa, synopsis, network dan charts.

d. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi

Penarikan kesimpulan diartikan sebagai penarikan arti dari kata yang tampil dengan melibatkan pemahaman peneliti. Banyak cara yang dapat digunakan dalam proses ini, antara lain menggunakan perbandingan secara luas atau khusus, pencatatan pola dan tema, pengelompokan, penggunaan metamor untuk taktik penegasan seperti triangulasi, pencarian kasus negatif, pengadaaan tindak lanjut hal-hal yang di luar duga serta pemeriksaan hasil-hasil dengan informan (Harun Rasyid, 2000 : 71).

Penyimpulan data tertulis, dengan bentuk deskriptif menggunakan pencatatan pola-pola dan tema, pengelompokan dan triangulasi dengan pemaknaan interpretasi-interpretasi logis. Apabila kesimpulan belum memadai, maka diperlukan penyajian ulang dengan cara mencari data lagi dilapangan dan coba interpretasikan dengan fokus yang lebih terarah.

Verifikasi adalah kegiatan pengoreksian terhadap paparan data dan kesimpla yang telah dibuat sebelumnya. Apabila paparan data atau kesimpulan tersebut masih ditemukan kejanggalan atau tidak sesuai dengan fokus penelitian maka akan dilakukan perbaikan atau penyempurnaannya. Verifikasi merupakan kegiatan akhir dalam sebuah analisis kualitatif, manakala verifikasi telah dilaksanakan dan dilakukan dengan baik, maka kegiatan analisis data dapat dikatakan berakhir. Aktivitas analisis data merupakan suatu proses interaksi antara ketiga komponen analisis. Dan proses analisis merupakan kegiatan yang kontinyu dari sejak awal sampai kegiatan penelitian berakhir.

G. Tahap-tahap Kegiatan Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, mulai bulan September 2008 hingga bulan Noperember 2008. Tahap-tahap yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian ini meliputi : (1) tahap persiapan, (2) tahap pelaksanaan, dan (3) tahap pembuatan laporan.

1. Tahap Persiapan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi penyusunan proposal, diskusi antar anggota tim peneliti guna penyempurnaan proposal yang selanjutnya akan diseminarkan.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian.

3. Tahap Pembuatan Laporan

Pada tahap ini disusun laporan secara tertulis, laporan penelitian dibuat dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Hal ini dilakukan untuk kepentingan publikasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Hasil penelitian yang berupa laporan penelitian akan diseminarkan.

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**DIMENSI ETNIK DALAM KEHIDUPAN POLITIK:
Studi Tentang Preferensi Tokoh Etnis
Dalam Pemilihan Walikota Pontianak**

*Ethnic Dimension in Political Life:
A Study on Ethnic Preference in the Election of Pontianak Mayor*

Eka Hendry Ar (Penanggungjawab merangkap Anggota)
M. Rahmatullah (Ketua merangkap Anggota)
Hermansyah (Anggota)
Segu (Anggota)
Suhaimi (Anggota)



**CENTER FOR ACCELERATION OF INTER RELIGIOUS AND ETHNIC UNDERSTANDING
(CAIREU) STAM PONTIANAK TAHUN 2008**

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografi

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Pulau Kalimantan. Bagian barat provinsi ini berbatasan dengan Laut Cina Selatan, bagian timur berbatasan dengan Kalimantan Timur, bagian tenggara dengan Kalimantan Tengah, bagian utara berbatasan dengan Sarawak (Malaysia Timur) dan bagian selatan berbatasan dengan Laut Jawa. Kalimantan Barat memiliki kawasan yang luasnya 146.807 km² atau 7,65% dari luas keseluruhan kawasan Indonesia.

Pontianak merupakan ibukota provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari enam kecamatan dan terbagi menjadi 29 kelurahan dengan luas 107,82 km² atau 0,073% dari keseluruhan luas Kalimantan Barat. Kota Pontianak terletak pada Lintasan Garis Khatulistiwa dengan ketinggian berkisar antara 0,10 meter sampai 1,50 meter di atas permukaan laut. Kota Pontianak terletak pada garis lintang 0° 02' 24" LU - 0° 01' 37" LS dan garis bujur 109° 16' 25" BT - 109° 23' 04" BT.

Kota Pontianak dibelah menjadi tiga bagian oleh sungai yakni: Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak dengan lebar kurang lebih 400 meter, sedangkan cabangnya mempunyai lebar 250 meter. Tinggi permukaan tanah dari permukaan laut antara 0,8 s/d 1,5 meter kedalaman air di sungai yang membelah sungai Pontianak berkisar antara 12 s/d 16 meter.

Struktur tanah merupakan lapisan tanah gambut bekas endapan lumpur Sungai Kapuas. Lapisan tanah liat baru dicapai pada kedalaman 2,4 meter dari permukaan laut. Kota Pontianak termasuk beriklim tropis dengan suhu yang tertinggi berkisar antara 28°–32° C dan suhu rata-rata pada siang hari 30° C. Rata-rata kelembapan nisbi dalam daerah Kota Pontianak maksimum 99,58 % dan minimum 53 % dengan rata-rata penyinaran matahari minimum 53 % dan maksimum 73 %.

Secara administratif Kota Pontianak dibagi menjadi enam kecamatan yakni:

1. Kecamatan Pontianak Utara
2. Kecamatan Pontianak Timur
3. Kecamatan Pontianak Selatan
4. Kecamatan Pontianak Barat
5. Kecamatan Pontianak Tenggara
6. Kecamatan Pontianak Kota

B. Demografi

Berdasarkan catatan Departemen Agama Kota Pontianak, penduduk Kota ini sebagian besar memeluk agama Islam yakni berjumlah 412.057 orang, disusul Katholik 38.722 orang, Protestan 34.984 orang, Hindu 2.424 orang, Budha 5.134 orang. Sedangkan yang memeluk agama selain kelima agama tersebut berjumlah 63.490 orang. Jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.1

PENDUDUK MENURUT AGAMA YANG DIANUT DI KOTA PONTIANAK

Population by Religion Follower in Pontianak City 2008

| No | Jenis Kejahatan | Agama | | | | | Lainnya |
|-------------|--------------------|---------|-----------|----------|-------|--------|---------|
| | | Islam | Protestan | Katholik | Hindu | Budha | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Pontianak Selatan | 60.546 | 11.854 | 11.305 | 119 | 1.607 | 15.531 |
| 2. | Pontianak Timur | 46.656 | 8.825 | 10.712 | 302 | 1.052 | 199 |
| 3. | Pontianak Barat | 158.267 | 8.372 | 9.268 | 623 | 1.006 | 571 |
| 4. | Pontianak Kota | 95.994 | 3.346 | 4.553 | 949 | 1.091 | 9.822 |
| 5. | Pontianak Utara | 50.594 | 2.587 | 2.784 | 431 | 378 | 37.367 |
| 6. | Pontianak Tenggara | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah 2005 | | 412.057 | 34.984 | 38.722 | 2.424 | 5.134 | 63.490 |
| 2004 | | 321.381 | 31.975 | 32.319 | 4.905 | 71.581 | 1.064 |

Sumber/Source : Kantor Agama Kota Pontianak

Kota Pontianak merupakan kawasan yang dibuka oleh perantau keturunan Arab. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kota yang terletak di kawasan pesisir Kalimantan Barat ini segera menjadi kota yang ramai. Selain sebagai tempat transit orang dan barang dari kawasan lain di Nusantara menuju kawasan pedalaman, Pontianak juga merupakan pusat pemerintahan sejak awal pembukaannya. Oleh karena itu, wajar jika penduduk kota ini sangat beragam etnisitasnya. Berikut tabel penduduk berdasarkan etnis:

Tabel 2.2
Penduduk Kota Pontianak Berdasarkan Etnik¹

| Suku Bangsa | Populasi | Persentase (%) |
|-------------------|----------------|----------------|
| Sambas | 14.972 | 3,22 |
| Cina | 106.897 | 23,02 |
| Jawa | 61.770 | 13,30 |
| Kendayan, Kenayan | 4.464 | 0,96 |
| Melayu Pontianak | 113.857 | 24,51 |
| Darat | 3.810 | 0,82 |
| Madura | 47.495 | 10,23 |
| Pesaguan | 4.310 | 0,93 |
| Lainnya | 106.857 | 23,01 |
| Jumlah | 464.432 | 100 |

Sumber: diolah berdasarkan BPS 2000

¹ Data etnik yang dikeluarkan oleh Badan pusat Statistik ini akhirnya ditarik dari peredaran karena diprotes oleh Masyarakat Dayak. Kepala Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat dikenakan hukum adat *Capa Mulut*. Akhirnya data tentang etnik hasil sensus penduduk tahun 2000 dilarang untuk dipublikasikan.

Agak berbeda dengan data di atas, berdasarkan situs resmi pemerintah Kota Pontianak, komposisi penduduk kota Pontianak berdasarkan etnik sebagai berikut:

Tabel 2.3
Penduduk Kota Berdasarkan Etnik (versi Pemkot)

| Suku Bangsa | Persentase (%) |
|----------------|----------------|
| Keturunan Cina | 31,24 |
| Melayu | 26,05 |
| Bugis | 13,12 |
| Jawa | 11,67 |
| Madura | 6,35 |
| Lainnya | 8,57 |
| Jumlah | 100 |

Sumber: <http://pemkot.pontianak.go.id/sejarah.html> (2008)

C. Sejarah²

Kota Pontianak bermula dari rombongan Syarif Abdurrahman Alkadrie membuka hutan di persimpangan tiga Sungai Landak Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Kapuas pada tanggal 24 Rajab 1181 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 23 Oktober 1771 Masehi. Di tempat itu rombongan Syarif Abdurrahman Alkadrie mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal. Pemukiman baru itu segera berkembang.

Pada tahun 1192 Hijriah, Syarif Abdurrahman Alkadrie dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pertama. Letak pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Masjid Raya Sultan Abdurrahman Alkadrie dan Istana Kadariah,

² Sumber utama bagian ini adalah website resmi pemerintah Kota Pontianak (<http://pemkot.pontianak.go.id/sejarah.html>)

yang sekarang terletak di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur. Sejak didirikannya tercatat beberapa sultan yang pernah memerintah di kesultanan ini yaitu:

1. Syarif Abdurrahman Alkadrie memerintah dari tahun 1771-1808
2. Syarif Kasim Alkadrie memerintah dari tahun 1808-1819.
3. Syarif Osman Alkadrie memerintah dari tahun 1819-1855.
4. Syarif Hamid Alkadrie memerintah dari tahun 1855-1872.
5. Syarif Yusuf Alkadrie memerintah dari tahun 1872-1895.
6. Syarif Muhammad Alkadrie memerintah dari tahun 1895-1944.
7. Syarif Thaha Alkadrie memerintah dari tahun 1944-1945.
8. Syarif Hamid Alkadrie memerintah dari tahun 1945-1950.

Tidak lama setelah sultan Sultan Kerajaan Pontianak dinobatkan, pada tahun 1194 H bersamaan tahun 1778 M, kolonial Belanda dari Batavia (Betawi) mengirim utusannya Petor (Asistent Resident) dari Rembang bernama Willem Ardinpola. Sejak saat itu bangsa Belanda berada di Pontianak. Belanda diberikan tempat oleh Sultan Pontianak pihak di seberang Keraton Pontianak yang terkenal dengan nama Tanah Seribu (Verkendelaal). Secara resmi pada tanggal 5 Juli 1779, pihak Belanda membuat perjanjian (Politiek Contract) dengan Sultan Pontianak tentang penduduk Tanah Seribu (Verkendelaal) untuk dijadikan tempat kegiatan Belanda. Seterusnya tempat itu menjadi kedudukan Pemerintah Resident het Hoofd Westerafdeeling van Borneo, dan Asistent Resident het Hoofd der Afdeeling van Pontianak. Selanjutnya Controleur het Hoofd Onderafdeeling van Pontianak/Hoofd Plaatselijk Bestur van Pontianak membawahi Demang het Hoofd der Distrik van Pontianak (Wedana) Asistent Demang het Hoofd der Onderdistrik van Siantan (Ass. Wedana/ Camat) Asistent Demang het Hoofd der Onderdistrik van Sungai Kakap (Ass. Wedana/Camat) berada dibawah kekuasaan Asistent Resident het Hoofd der Afdeeling van Pontianak (semacam Bupati KDH Tk. II Pontianak).

Sementara itu didirikan Plaatselijk Fonds yang merupakan badan yang mengelola dan mengurus Eigendom (milik) Pemerintah dan keuangan yang diperoleh dari: Pajak, Opstalperceelen, Andjing Reclame, minuman keras dan retribusi pasar, penerangan jalan, semuanya berdasarkan Verordening/Peraturan yang berlaku. Daerah kerja Plaatselijk Fonds adalah daerah Verkendepaal (Tanah Seribu). Pimpinan Plaatselijk Fonds terdiri dari: Voorziter (Ketua) Beheerder Staadsfonds (Pimpinan selain Voorzter), Sekretaris. Behercomisie dibantu beberapa Comisieleden (Pengawasan) Plaatselijk Fonds, setelah pendaratan Jepang, praktis terhenti, terkecuali soal kebersihan, dan bekerja kembali dengan pimpinan tentara Jepang, setelah masuk tenaga sipil Jepang dan adanya Kenkarikan (semacam Asisten Resident) Jepang, maka Plaatselijk Fonds dihidupkan kembali berganti nama *shintjo* yang dipimpin orang Indonesia yaitu Alin. Bp. Muhammad Abdurrachman sebagai *shintjo*. Untk menyelenggarakan pemerintahan sipil Demang dan Asisten Demang tetap dipertahankan dengan nama Jepang *guntjo*.

Berdasarkan Besluit Pemerintah Kerajaan Pontianak tanggal 14 Agustus 1946 No. 24/1/1946 PK yang disahkan/Goedgskeurd de Resident der Westerafdeeling van Borneo (Dr. J Van Der Swaal) menetapkan sementara sebagai Syahkota pertama adalah R. Soepardan. Syahkota melakukan serah terima harta benda dan keuangan Plaatselijk Fonds pada tanggal 1 Oktober 1946 dari Staats Fonds Muhammad Abdurrachman. Masa jabatan Syahkota R. Soepardan 1 Oktober 1946 dan berakhir awal tahun 1948. Selanjutnya berdasarkan penetapan Pemerintah Kerajaan Pontianak diangkat Ads. Hidayat, dengan jabatan Burgermester Pontianak sampai tahun 1950.

Pembentukan Stadsgerneente bersifat sementara, maka Besluit Pemerintah Kerajaan Pontianak tanggal 14 Agustus 1946 No. 24/1/1946/KP diubah dan diperhatikan kembali dengan Undang-Undang Pemerintah Kerajaan Pontianak tanggal 16 September 1949 No. 40/1949/KP memutuskan mulai dari tanggal Peraturan ini berlaku maka Keputusan Pemerintah Kerajaan Pontianak bertanggal 14 Agustus 1946 No. 24/1/1946/KP diubah dan

diperhatikan kembali. Dalam undang-undang ini disebut Peraturan Pemerintah Pontianak dan membentuk Pemerintah kota Pontianak. Sedangkan perwakilan rakyat disebut Dewan Perwakilan Penduduk Kota Pontianak.

Walikota pertama ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Pontianak adalah Ny. Rohana Muthalib, sebagai wakil Walikota Pontianak, dan apa sebab kedudukannya sebagai Wakil Walikota Pontianak, mengingat pasal 25 dari U.U. Ketua Pontianak sebagai Walikota hanya dapat diangkat lelaki yang menurut keputusan Hakim.

Soemartoyo diangkat sebagai pengganti Ny. Rohana Muthalib sebagai Walikota Besar Pontianak, mengingat peralihan Kekuasaan Swapraja Pontianak kepada Bupati/Kabupaten Pontianak tidak termasuk, maka Pemerintah Daerah Kota Besar Pontianak berstatus Otonom.

Sesuai dengan perkembangan Tata Pemerintahan, maka dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, bentuk Pemerintahan Landschap Gemeente, ditingkatkan menjadi Kota Praja Pontianak. Pada masa ini Urusan Pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah).

Selanjutnya perkembangan Pemerintah Kota Praja Pontianak berubah dan sebutannya yaitu dengan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 dan Penetapan Presiden No.5 Tahun 1960, Instruksi Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 1964 dan Undang Undang No. 18 Tahun 1965, maka berdasarkan Surat Keputusan DPRD-GR Kota Praja Pontianak No. 021/KPTS/DPRD-GR/65 tanggal 31 Desember 1965, nama Kota Praja Pontianak diganti menjadi Kotamadya Pontianak.

Kemudian dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1974, maka sebutan/nama Kotamadya Pontianak berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah di Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia merubah sebutan untuk Pemerintah Tingkat II Pontianak menjadi sebutan Pemerintah Kota Pontianak.

Adapun nama-nama Kepala Wilayah yang pernah memerintah di Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Nama-Nama Kepala Wilayah Kota Pontianak

| Nama | Status Wilayah | Tahun Pemerintahan |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| R. Soepardan | Syahkota Pontianak | 1947-1948 |
| Ads. Hidayat | Burgemester Pontianak | 1948-1950 |
| Ny. Rohana Muthalib | Burgemester Pontianak | 1950-1953 |
| Soemartoyo | Kotapraja | 1953-1957 |
| A. Muis Amin | Kotapraja | 1957-1967 |
| Siswoyo | Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak | 1967-1973 |
| Muhammad Barir ,SH. | Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak | 1973-1978 |
| T.B. Hisny Halir | Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak | 1978-1983 |
| H. A. Majid Hasan | Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak | 1983-1993 |
| R.A. Siregar, S.Sos | Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak | 1993-1999 |
| dr. H. Buchary A | Kota Pontianak | 1999-2003 |
| dr. H. Buchary A | Kota Pontianak | 2003-2008 |
| H. Sutarmidji, SH, M.Hum ³ | Kota Pontianak | 2008-2013 |

Sumber: <http://pemkot.pontianak.go.id/sejarah.html> (2008) dengan penyesuaian hasil pilwako terbaru.

D. Dinamika Etnik di Kota Pontianak

Kesultanan Pontianak sebagai cikal bakal kota Pontianak terletak pada pertemuan aliran sungai Kapuas dan Landak merupakan tempat yang menghubungkan pedalaman Kalimantan Barat dengan kawasan pesisir. Selain itu, Pontianak dikelilingi oleh sejumlah kerajaan yang relatif sudah lama berdiri, seperti kerajaan Sambas dan Mempawah di Utara; kerajaan Sukadana, Matan, Tanjung Pura, Simpang dan Kubu di Selatan. Sementara itu, di

³ Walikota terpilih dalam Pilwako tahun 2008

pedalaman sungai Kapuas terdapat kerajaan Landak, Tayan, Sanggau, Sekadau, Sintang serta beberapa kerajaan kecil seperti Silat, Selimbau, Piasak, Jongkong, dan Bunut. Di samping perairan Selat Melaka merupakan jalur pelayaran dan perdagangan yang telah ramai dikunjungi oleh pedagang asing ketika itu. Posisi yang strategis itu segera mengubah Pontianak menjadi pusat pelayaran dan perdagangan yang sangat strategis (bandingkan Moh. Haitami Salim 2008).

Dari segi geografis, Pontianak memang terletak di antara jalur perdagangan di Selat Melaka. Posisi itu menjadikan Pontianak sebagai daerah persinggahan perdagangan, baik dari timur maupun barat Nusantara, terutama hubungannya dengan Singapura sebagai pusat perdagangan setelah jatuhnya Melaka. Selain itu, kota ini juga terletak pada jalur pelayaran antara Cina dan India.

Sebagai kawasan yang terletak di jalur yang ramai, banyak orang tertarik untuk berkunjung ke Pontianak. Aliran sungai Kapuas dan sungai Landak sudah sejak lama dijadikan jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan antar daerah menjadikan Pontianak sangat diuntungkan karena berada pada posisi silang antara kedua aliran sungai tersebut.

Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kota Pontianak sudah berkembang dengan pesat. Pergerakan masyarakat dari dan ke Pontianak kian semakin intensif, baik dengan maksud mengadakan kontak dagang maupun hanya sekedar berkunjung dan pada akhirnya menetap di daerah ini. Tidak mengherankan bila dalam waktu yang singkat di kota Pontianak dan sekitarnya berdiri perkampungan atau pemukiman baru yang diberi nama sesuai daerah asal pendatang, seperti kampung Arab, Tambelan Sampit, Kamboja, Saigon, Bangka Belitung, Banjar Serasan, Jawa Tengah, Bugis dan sebagainya (Bandingkan Ansar Rahman 2000). Terbentuknya masyarakat majemuk yang terdiri atas berbagai suku bangsa dan bangsa asing pada dasarnya terjadi karena sikap penduduk asli, yang terbuka menerima kedatangan berbagai suku bangsa di daerah mereka. Sikap ini memberikan

peluang bagi suku bangsa dan bangsa-bangsa asing masuk dan bermukim di daerah ini.

Keragaman penduduk yang berdiam di Pontianak terjadi karena adanya pergerakan penduduk yang datang dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, nusantara dan manca negara, seperti Kamboja dan Saigon. Tidak heran, selain ada nama-nama kampung yang menunjukkan asal daerah dari luar Kalimantan Barat, juga ada nama kampung yang menunjukkan asal daerah manca negara, yaitu kampung Kamboja (berada kecamatan Pontianak Selatan) dan kampung Saigon (berada kecamatan Pontianak Timur), seperti yang telah disebut terdahulu (lihat Moh. Haitami Salim 2008).

Keragaman masyarakatnya ini terbentuk sejak awal berdirinya Kesultanan Pontianak dan berkembang sampai sekarang menjadi daerah yang “terbuka” bagi setiap pendatang. Pada saat pertama kali membuka lahan saja untuk mendirikan pemukiman baru, Sultan Syarif Abdurrahman telah “mendatangkan” para pekerja dari Benggali (Ansar Rahman 2000) dibantu oleh orang-orang Dayak. Sementara Sultan sendiri keturunan campuran Arab, Melayu, Bugis dan Banjar.

Sejarah yang panjang telah membentuk kota Pontianak menjadi kawasan yang dihuni oleh masyarakat multi-etnik. Keadaan ini didukung, selain sebagai pusat pemerintahan, Pontianak juga merupakan pusat perdagangan, pendidikan, kebudayaan dan hiburan. Seiring dengan fungsinya sebagai pusat pemerintahan, Pontianak menjadi kota Pontianak menjadi dinamis sesuai dengan latar belakang masyarakatnya yang sangat beragam, baik dari segi suku bangsa, agama, adat istiadat dan khazanah budaya.

Sultan Matan yang berkunjung ke Pontianak pada akhir abad ke-19 mencatat bahwa kota ini sudah menjadi kawasan yang sangat ramai. Kota hidup dengan aktivitas perdagangan. Bahkan, pada masa itu kehebatan kedai di Pontianak sudah dapat menyaingi Singapura. Pemilik toko yang hebat itu adalah orang-orang Cina dan Keling Surati (Bombay) (lihat Arenawati 1989: 145). Berbagai suku yang mendiami kota Pontianak pada masa itu sempat dicatat oleh Sultan adalah orang-orang Jawa dari Betawi dan Surabaya. Selain

itu ada orang Bali dan Madura. Orang-orang dari kawasan lain di Kalimantan pun banyak di Pontianak seperti dari Banjarmasin, Martapura, Brunei, Sarawak. Ada juga orang Siak, Bangkahulu, Padang, Deli, Kampar, Kuantan, Jambi, dan Palembang dari Sumatera. Orang-orang Buton, Makasar dan Bugis dari Sulawesi juga ada di Pontianak ketika itu. Sementara itu, tercatat pula orang-orang Pulau Pinang, Singapura, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, Patani, dan Kelantan dari Semenanjung Malaya. Bahkan, orang-orang Asing dari Kamboja, Arab Hadramaut, Habsi, Arab Walkiti (Mesir), India (Keling dan Surati), serta orang Eropa; Inggris dan Belanda ada di Pontianak (lihat Arenawati 1989: 149).

Pada perkembangan selanjutnya berbagai suku bangsa melebur dalam pola identifikasi yang unik. Orang-orang Arab, orang yang berasal dari Sumatera, Sulawesi dan berbagai kawasan lainnya semuanya dianggap sebagai Melayu. Bahkan orang India Kelingpun dianggap Melayu. Pola ini nampaknya mengikuti pola umum sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Kalimantan Barat. Secara umum, orang yang Islam dianggap Melayu. Penduduk asli yang mempertahankan agama lokal atau masuk kristen disebut Dayak. Di sini agama sangat berperan dalam penentuan identifikasi suku.

Melayu identik dengan Islam. Proses perpindahan agama ke Islam bagi mereka yang bukan berasal dari suku Melayu digunakan beberapa istilah dengan konotasi yang juga beragam. Sebagaimana ditemukan oleh Yusriadi dan Hermansyah (2003) di Embau (salah satu daerah di pedalaman Kapuas Hulu, Kalimantan Barat) bahwa orang Dayak yang masuk Islam disebut "pulang Melayu".⁴ Proses ini tidak hanya menimbulkan identifikasi kepada Melayu, akan tetapi menimbulkan proses alienasi atau saling "meninggalkan",

⁴ Selain disebut masuk Melayu orang Dayak yang masuk Islam kadang-kadang disebut "Dayak turun", karena terjadi perpindahan lokasi tempat tinggal, dari daerah perbukitan turun ke pesisir sungai, tempat yang umumnya sudah ditempati oleh orang Melayu. Menurut Syarif I. Alqadrie (2002), proses identifikasi pada suatu agama tertentu juga terjadi pada suku Dayak. Identifikasi etnik Masyarakat Dayak lebih kepada suku induknya (*the primary ethnic group*) yaitu Suku Dayak (*Dayakness*) ketimbang kepada sub-etnik. Proses ini terjadi sekitar pertengahan 1970-an, dengan dimotori oleh kelompok terpelajar Dayak (kelas menengah) telah terjadi perubahan orientasi keagamaan dari garis agama yang beragam kepada suatu agama tertentu, yaitu Kristen (Protestan dan Katholik).

misalnya antara orang Dayak yang masih beragama asal dengan mereka yang telah masuk Islam (Alqadrie 2002). Sebaliknya, orang Melayu yang meninggalkan agamanya dianggap keluar dari Melayu. Dengan kata lain, orang yang telah masuk Islam atau sebaliknya dianggap telah “keluar” atau “meninggalkan” komunitas asalnya, sehingga berakibat hilangnya pengakuan terhadap yang bersangkutan sebagai sesama komunitas etnik⁵.

Sutini Ibrahim (1996) menemukan istilah “Senganan” di beberapa tempat di Kapuas Hulu, Sintang dan Sanggau. Enthoven (King 1993) menemukan istilah “pengaki”, sebagai kelompok Islam transisi, yaitu mereka yang baru pindah agama dari agama lama kepada Islam. Namun, mereka belum sepenuhnya dapat meninggalkan kebiasaan lamanya yang sebelum Islam seperti minum-minuman keras dan masih menghuni rumah panjang. Selain istilah Senganan, ada juga istilah “*Islam burung*”. Sebutan “burung” ini untuk menyebutkan kelompok masyarakat yang baru saja memeluk Islam namun masih bersifat nominal. Walaupun istilah itu masih sekali-sekali digunakan, namun kelompok masyarakat yang memiliki corak beragama seperti yang digambarkan Enthoven 200 tahun yang lalu, sekarang tidak ditemukan lagi (Hermansyah 2006).

Selain itu ada juga pembatasan dalam identifikasi seperti kepada asal daerah. Misalnya identitas ke-Melayu-an seseorang di samping berdasarkan karakteristik bahasa dan agama juga kepada daerah asal, seperti Melayu Pontianak, Melayu Sambas, Melayu Ketapang, Melayu Kapuas Hulu dan sebagainya. Dalam kasus konflik sosial antar kelompok etnik, faktor identifikasi berdasarkan geografis ini besar andilnya. Dalam kasus konflik Melayu Sambas dan Madura, Melayu Kapuas Hulu dan Melayu daerah lain tidak merasa bagian dari masyarakat Melayu Sambas yang berkonflik, demikian pula jika konflik terjadi di daerah lain.

⁵ Namun akhir akhir-akhir ini muncul kesadaran di kalangan masyarakat lokal untuk mempertahankan identitas etniknya tanpa dipengaruhi oleh agama yang dipeluknya seperti yang terjadi pada orang Kanayatn di Kabupaten Landak (lihat Hermansyah, 2009 khususnya Bab II, dalam proses penerbitan)

Dinamika yang relatif tinggi itu juga terlihat dari munculnya berbagai paguyuban berdasarkan afiliasi etnik maupun asal usul. Dalam 15 tahun terakhir paling tidak muncul empat paguyuban besar masyarakat Pontianak yang berdasarkan afiliasi Etnik yakni: Majelis Adat Budaya Melayu (MABM), Dewan Adat Dayak (DAD), Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM), dan Majelis Adat dan Budaya Tionghoa (MABT). Selain itu, muncul juga organisasi kelompok etnik seperti Bugis, Batak, Banjar dan Jawa. Kalau dulu sebagian anggota etnik-etnik yang disebutkan terakhir dianggap Melayu, sekarang ada upaya meneguhkan kembali identitas etniknya dengan membuat paguyuban etnik. Dengan demikian ada proses "keluar" dari Melayu. Walaupun, identitas etnik yang "keluar" dari Melayu itu tidak terlalu di ekspos, karena secara politik belum terlalu menguntungkan. Identitas itu umumnya dimainkan di kalangan internal untuk memperkuat soliditas. Yang ditampilkan untuk komoditas publik masih Melayu.

Paguyuban kelompok etnik ini biasanya akan sangat gencar dibicarakan jika terjadi permasalahan menyangkut relasi antar etnik atau ketika adanya momentum politik tertentu seperti pemilihan kepala daerah. Paguyuban ini selalu dilibatkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang mengaitkan isu etnik. Selain itu, paguyuban ini juga dikaitkan dengan isu dukung-mendukung para calon yang akan bertarung memperebutkan kursi kepala daerah. Bahkan, para kandidat tertentu melakukan safari khusus untuk bertemu dengan pengurus paguyuban tersebut untuk mendapatkan dukungan.

Kenyataannya di Pontianak sudah terjadi beberapa kali perkelahian yang melibatkan anggota etnik yang beragam itu dan kasus-kasus tersebut sebagiannya dibawa atau paling tidak diisukan bernuansa etnik. Kasus terakhir adalah peristiwa yang terkenal dengan nama "kasus gang 17".⁶ Kasus gang 17 adalah peristiwa kriminalitas murni yang berkenaan dengan keluarga Syarif dan oknum warga Tionghoa Ek San. Namun oleh oknum tertentu kasus

⁶ Laporan lengkap peristiwa ini bisa dilihat dalam http://andreasharsono.blogspot.com/2008/07/panasnya-pontianak-panasnya-politik_05.html

tersebut digeneralisir sebagai konflik Melayu⁷-Cina (Tionghoa).⁸ Kerusuhan di Gang 17 Jalan Gajahmada Pontianak tersebut berakhir membuat kesepakatan damai. Salah satu butir kesepakatan itu adalah pihak keluarga pelaku diminta membuat iklan permintaan maaf di media masa lokal. Menariknya, permintaan maaf pelaku tidak dilakukan atas nama pribadi tetapi atas nama masyarakat Tionghoa dan ditandatangani oleh sembilan orang Tionghoa yakni: Lie Khie Leng, Kardi Kahim, Sutadi, Phang Khat Fu, Lim Kui On, Tan Tek Sie, Ateng Sanjaya dan Setiawan Lim. Iklan permohonan maaf tersebut dimuat di harian lokal: Pontianak Post, Equator, Berita Khatulsitiwa dan Borneo Tribune⁹ yang bunyinya :

PERMINTAAN MAAF

BERDASARKAN HASIL PERTEMUAN SECARA KEKELUARGAAN
YANG DIPRAKARSAI OLEH KEPOLISIAN KOTA BESAR PONTIANAK,
KAMI ATAS NAMA WARGA TIONGHOA KOTA PONTIANAK DENGAN
INI MENYAMPAIKAN PERMOHONAN MAAF ATAS
KESALAHFAHAMAN YANG TERJADI PADA HARI KAMIS MALAM
TANGGAL 6 DESEMBER 2007 DI JALAN TANJUNGPURA GANG

⁷ Menariknya pihak yang terlibat adalah keturunan Arab, tetapi secara umum mereka disebut Melayu.

⁸ Perdamaian ini ditandai dengan kesepakatan keluarga korban, Sy. Mustafa dan keluarga tersangka, Ek San, di hadapan Walikota Pontianak, dr. H. Buchary A Rahman, Sabtu (22/12/08) pukul 20.30 WIB di rumah jabatan Walikota Pontianak. Penandatanganan kesepakatan juga dilaksanakan di rumah jabatan Walikota Pontianak. Pertemuan ini dilakukan secara tertutup dan dihadiri keluarga korban, keluarga tersangka, serta Ketua Yayasan Bhakti Suci, Lindra Lie dan pengacara tersangka, Sutadi SH. Dalam pertemuan tersebut, pihak keluarga Syarif Mustafa dan Syarif Ahmad Husein Alkadri mengajukan tiga tuntutan kepada keluarga tersangka. Pertama, keluarga tersangka harus menanggung pembiayaan selama di rumah sakit, baik obat, tindakan medis, maupun operasi. Akibat kejadian itu, korban menjalani operasi dan rawat inap di rumah sakit selama 13 hari. Kedua, korban meminta tersangka untuk menanggung semua pembiayaan seandainya dikemudian hari terjadi sesuatu terhadap kesehatan korban, sebagai akibat dari peristiwa di Gang 17 tersebut. Terakhir, pihak tersangka diminta untuk meminta maaf secara terbuka di media cetak lokal kepada Syarif Mustafa dan Syarif Ahmad Husein, serta seluruh keluarga Melayu yang tersinggung dengan kejadian tersebut. (Pontianak Post Senin, 24 Desember 2007).

⁹ Belakangan seorang tokoh Tionghoa, Chua Yag Khui, memprotes pihak yang membuat iklan tersebut karena mengatasmakan warga Tionghoa Pontianak. Menurutnya tidak semua orang Tionghoa bertanggung jawab atas "peristiwa gang 17." Oleh karena itu, tidak ada kewajiban warga Tionghoa meminta maaf. Yang harus meminta maaf hanyalah pihak yang terlibat yakni keluarga Ek San.

TUJUHBELAS DAN SEKITARNYA, KEPADA SAUDARA-SAUDARA
KAMI YANG MENJADI KORBAN ATAU YANG TERGANGGU DALAM
PERISTIWA TERSEBUT.

DEMIKIAN PERMOHONAN MAAF INI KAMI BUAT DENGAN SEBENAR-
BENARNYA TANPA ADANYA UNSUR PAKSAAN DARI PIHAK
MANAPUN, DENGAN DILANDASI CINTA KEDAMAIAN DAN
SEMANGAT NASIONALISME DALAM KERANGKA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Isu konflik antara Melayu-Cina tersebut sempat menghangat karena sebelum itu calon pasangan Gubernur yang berasal dari etnik Dayak dan Cina baru saja mengalahkan tiga pasangan Melayu/Dayak. Beberapa peristiwa kerusuhan sosial antar etnik yang pernah terjadi di Kalimantan Barat, beberapa di antaranya dimulai dari perkelahian dua orang anggota etnik yang berbeda kemudian meluas menjadi kerusuhan massal.

LAPORAN HASIL PENELITIAN

DIMENSI ETNIK DALAM KEHIDUPAN POLITIK: Studi Tentang Preferensi Tokoh Etnis Dalam Pemilihan Walikota Pontianak

*Ethnic Dimension in Political Life:
A Study on Ethnic Preference in the Election of Pontianak Mayor*

Eka Hendry Ar. (Penanggungjawab merangkap Anggota)
M. Rahmatullah (Ketua merangkap Anggota)
Hermansyah (Anggota)
Segu (Anggota)
Suhaimi (Anggota)



CENTER FOR ACCELERATION OF INTER RELIGIOUS AND ETHNIC UNDERSTANDING
(CAIREU) STAIR PONTIANAK TAHUN 2008

BAB III

Gambaran Proses Pemilihan Walikota Pontianak tahun 2008

A. Deskripsi Umum

Dinamika demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator keberhasilan pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Ini menunjukkan adanya loncatan besar dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Perkembangan terakhir menyatakan bahwa Pilkada telah dilakukan sejak tahun 2005 dengan tidak menafikan berbagai macam kekurangan yang ada selama proses pilkada berlangsung¹.

Dengan disyahnkannya undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu, yang merupakan penyempurnaan dari aturan terdahulu sehingga ada undang-undang tersendiri yang lebih komprehensif, maka muncullah harapan bahwa pemilu dapat berjalan semakin baik, meskipun masih ada celah dalam penyelenggaraannya.

Konsep otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia telah memberikan kemungkinan bagi setiap daerah untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah dan menentukan pemerintah masing-masing. Dalam proses penyelenggaraannya, tidak menutup kemungkinan banyak persoalan atau masalah yang akan muncul sebagai akibat dari kepentingan yang berbeda dari kelompok elit politik yang bertarung dalam memperebutkan kekuasaan.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka pemilihan kepala daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Artinya, proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang selama ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah mengalami perombakan. Karena itu,

¹ Pontianak Post Online.com diakses tanggal 08 Oktober 2008

siapa yang akan menjadi kepala daerah akan ditentukan sendiri oleh rakyat di daerahnya.

Munculnya pilkada langsung ini merupakan proses perkembangan demokrasi dan demokratisasi di tanah air yang cukup menggembirakan. Pilkada langsung diharapkan akan menggairahkan dan merangsang tumbuhnya kekuatan-kekuatan baru yang mendukung proses demokrasi di daerah. Melalui pilkada langsung diharapkan akan lahir pemimpin-pemimpin baru yang memiliki komitmen politik dengan rakyat pemilih, serta mampu melakukan terobosan baru untuk membangun daerahnya.

Tensi politik bagi daerah yang menyelenggarakan pilkada biasanya memanas seiring dengan munculnya rivalitas antara berbagai kekuatan politik yang bertarung dalam pesta demokrasi. Dalam konteks inilah politik seringkali didefinisikan sebagai sebuah upaya untuk mencapai kekuasaan, yang sesungguhnya dapat menarik minat banyak orang untuk bergabung dalam proses tersebut.

Penyelenggaraan pilkada tentu saja merupakan aktivitas yang berhubungan dengan kekuasaan. Seluruh partai yang menjagokan pasangannya memiliki kepentingan untuk menjadi pemenang dalam kegiatan ini, begitupun individu yang menjadi kandidat. Oleh karena itu sudah seharusnya setiap kelompok yang ikut bertarung akan selalu siap untuk menang dan selalu siap untuk kalah, akan tetapi pada kenyataannya banyak kasus yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia ketika pilkada selesai, banyak kandidat atau kelompok yang kalah tidak siap menerima kekalahan dengan berbagai macam alasan yang mereka kemukakan, sehingga akibatnya muncul konflik yang besar.

Partisipasi politik masyarakat sering kali juga tidak dalam domain kesadaran pemilih rasional melainkan kesadaran palsu yang dimanipulasi oleh ikatan-ikatan tradisional. Fenomena pemilihan kepala daerah seringkali menggunakan idiom-idiom primordial seperti suku, etnis, ras dan agama ke dalam ranah politik praktis seperti pada saat kampanye dilakukan. Oleh karena itu kompetisi pilkada tidak hanya ditentukan oleh kemampuan masing-masing

calon dalam menjual konsep dan visi-misinya kepada rakyat yang nantinya menjadi pelaku utama dalam proses demokrasi ini.

Belajar dari pengalaman pemilu yang sudah terlaksana diberbagai daerah, fakta menunjukkan bahwa pilkada memang sangat rentan dengan konflik, karena instrumen pendukung pelaksanaan pilkada diberbagai daerah banyak menimbulkan celah untuk melahirkan interpretasi yang bermacam-macam. Selain itu, undang-undang yang mengatur pilkada juga memiliki celah untuk munculnya konflik politik yang memunculkan kekerasan, sekalipun fakta menunjukan bahwa saat ini pencalonan tidak hanya dari partai politik akan tetapi dapat juga melalui jalur independent (perseorangan).

Berangkat dari realitas diatas paling tidak menurut Usman Yasin terdapat lima sumber potensial yang dapat memicu konflik dalam pilkada. Pertama, konflik yang bersumber dari mobilitas atas nama etnik, agama, daerah dan lain-lain. Kedua, konflik yang bersumber dari *black campaign* antar pasangan calon. Ketiga, konflik yang bersumber dari premanisme politik dan pemaksaan kehendak. Keempat, konflik bersumber pada manipulasi dan kecurangan perhitungan suara hasil pilkada. Terakhir adalah konflik bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap aturan-aturan main penyelenggaraan pilkada.

Hubungannya dengan pilkada yang telah dilakukan diberbagai daerah di Indonesia menurut data yang ada sejak Juni 2005 hingga Juni 2007, telah dilaksanakannya pilkada di 285 dari 440 kabupaten/kota dan 15 dari 33 provinsi di Indonesia. Pemilihan Walikota (Pilwako) Kota Pontianak tentu saja menambah daftar pelaksanaan pilkada di Indonesia, sekalipun sangat berbeda dibandingkan dengan pilwako sebelumnya, karena pilwako kota Pontianak tahun 2008 adalah pilwako pertama yang melibatkan seluruh masyarakat kota Pontianak untuk menentukan Walikotaanya, dan diperbolehkan calon dari perseorangan (independent) untuk maju sebagai peserta dalam pilwako.

Disyahnannya undang-undang nomor 12 tahun 2008 yang membolehkan calon perseorangan maju dalam pilkada tentu saja memberikan warna

tersendiri dalam pilwako Kota Pontianak, karena setidaknya ada beberapa aspek positif yang muncul dengan adanya calon perseorangan, pertama, diharapkan dominasi partai politik dalam proses penetapan kandidat semakin kecil, artinya pintu masuk menjadi calon pemimpin daerah akan semakin banyak. Kedua, masyarakat memiliki peluang yang cukup besar untuk menentukan alternatif.

Merujuk kasus pemilihan Walikota Pontianak Tahun 2008 tentu saja persoalan yang telah diinventarisir dari berbagai hasil penelitian dan survey dilapangan, sedikit atau banyak juga terjadi di pesta demokrasi ini, salah satu contoh adalah munculnya kandidat dari jalur perseorangan (independent) sebanyak tiga pasangan, yaitu pasangan (1) Haitami – Gusti Hardiansyah, (2) Injek Baranyunk – Muhammad Rifal (3) Tan Tjun Hwa – Nagian Imawan. Persoalan yang muncul kemudian adalah dimulai ketika PPK dan PPS melakukan verifikasi faktual tanggal dari tanggal 04 s/d 24 Juli 2008 ditemukan bahwa tidak semua dari foto copy KTP sebagai bentuk dukungan masyarakat yang diserahkan ke KPU Kota Pontianak memenuhi persyaratan standar minimal. Berdasarkan SK KPU Kota Pontianak nomor 15 tahun 2008 tentang calon perseorangan minimal empat persen (4%) dari jumlah total penduduk kota pontianak saat ini sebanyak 634.625 jiwa, sehingga dukungan minimal untuk calon perseorangan adalah 25.385 jiwa.

Proses verifikasi yang dilakukan oleh PPS dan PPK yaitu dengan 2 (dua) tahap: pertama, melakukan verifikasi administrasi dan faktual pendukung serta rekapitulasinya di tingkat PPS. Dalam masa itu PPS melakukan verifikasi syarat dukungan yang diserahkan calon perseorangan ke wilayah mereka. Tiga hari pertama PPS melakukan verifikasi administrasi kemudian verifikasi faktual. Seluruh populasi dukungan diverifikasi dengan cara petugas datang langsung kerumah-kerumah warga atau warga dikumpulkan disuatu tempat agar mempermudah petugas untuk melakukan pendataan. Setelah selesai kemudian verifikasi selanjutnya dilakukan oleh PPK ditingkat kecamatan, baru kemudian diserahkan ke KPU Kota Pontianak untuk ditindaklanjuti.

Berdasarkan SK KPU Kota Pontianak tersebut dengan mempertimbangkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh PPS dan PPK, pada tanggal 28 Juli 2008 menyatakan gugur 2 (dua) pasangan dari jalur perseorangan yaitu pasangan Inkek Baranyunk-Muhammad Rifal (didukung 21.137 dari 26.851 orang), dan pasangan Tan Tjun Hwa-Nagian Imawan (didukung 19.661 dari 28.634 orang) karena tidak memenuhi syarat dukungan minimal 25.385 orang. Selain itu kedua pasangan tersebut juga terindikasi melakukan kecurangan-kecurangan yaitu melakukan pemalsuan dan penipuan terhadap penggandaan KTP masyarakat.

Persoalan tersebut tidak selesai begitu saja, karena para pendukung kedua pasangan yang dinyatakan gugur oleh KPU, tidak bisa menerima keputusan KPU dengan berbagai macam argumentasi, sebagai bentuk protes mereka terhadap keputusan KPU mereka mengerahkan para pendukungnya untuk menduduki sekretariat KPU selama beberapa hari sampai ada kejelasan terhadap hasil keputusan tersebut.

KPU Daerah Kota Pontianak telah melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi bagi semua pasangan calon, tidak hanya calon perseorangan tetapi juga calon yang diusung dari partai politik dan menetapkan tujuh pasang sebagai berikut :

| No | Nama Pasangan | Partai Pendukung |
|----|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Drs. Moh. Haitami Salim | Independent/Perseorangan |
| | Ir. H. Gusti Hardiansyah, M. Sc, QAM | |
| 2 | drg. H. Oscar Primadi, MPH | PKB dan Demokrat |
| | Drs. Hartono Azas, MBA | |
| 3 | Ir. H. Muhammad Abduh | PKS dan PAN |
| | Muhammad Thaha, SH | |
| 4 | H. Sutarmidji, SH, M. Hum | PPP, Partai Pelopor, PKPI |
| | Paryadi, S. Hut | |
| 5 | Ir. Harso Utomo Suwito | PBB dan bebrapa partai kecil |
| | H. Awaluddin Rahmat (H. Kalut) | |
| 6 | H. Gusti Hersan, SE | Golkar |
| | Setiawan Lim, SH | |
| 7 | Dra. Sri Astuti Buchari, M. Si | PDIP |
| | H. Eka Kurniawan, SE, MM | |

Sehari sesudah penetapan calon pasangan walikota itu, juga dilakukan penetapan nomor urut peserta pilwako tahun 2008.

B. Konstelasi Politik Menjelang Pemilihan Wali Kota

Munculnya 7 (tujuh) pasang calon Wali Kota dan Wakil Walikota periode 2008-2013 dari berbagai macam latar belakang baik etnis, agama dan golongan. Berdampak pada konstalasi politik menjelang pemilihan, disadari atau tidak bahwa masyarakat kita masih banyak yang terikat dengan sikap-sikap subyektif yaitu memilih pasangan berdasarkan satu etnis atau agama tanpa mempertimbangkan visi-misi dan program yang ditawarkan oleh setiap pasangan.

Persoalan di atas bukan tanpa argument, merujuk hasil pemilihan Gubernur Kalimantan Barat tahun 2007 kemenangan Cornelis sebagai Gubernur lebih karena faktor etnis yang lebih dominan selain faktor-faktor yang lain. Oleh karena itu pilwako Kota Pontianak menurut hemat kami hampir sama dengan kasus Pilgub, berikut kami tampilkan 7 (tujuh) pasang calon dilihat dari keterwakilan etnis, yaitu:

DAFTAR CALON PASANGAN PILWAKO KOTA PONTIANAK TAHUN 2008

| No | Nama Pasangan | Keterwakilan Etnis |
|----|--------------------------------------|---------------------|
| 1 | Drs. H. Moh. Haitami Salim, M. Ag | Melayu |
| | Ir. H. Gusti Hardiansyah, M. Sc, QAM | |
| 2 | drg. H. Oscar Primadi, MPH | Melayu dan Tionghoa |
| | Drs. Hartono Azas, MBA | |
| 3 | Ir. H. Muhammad Abduh | Melayu |
| | Muhammad Thaha, SH | |
| 4 | H. Sutarmidji, SH, M. Hum | Melayu dan Madura |
| | Paryadi, S. Hut | |
| 5 | Ir. Harso Utomo Suwito | Tionghoa dan Melayu |
| | H. Awaluddin Rahmat (H. Kalut) | |
| 6 | H. Gusti Hersan, SE | Melayu dan Tionghoa |
| | Setiawan Lim, SH | |
| 7 | Dra. Sri Astuti Buchari, M. Si | Melayu |
| | H. Eka Kurniawan, SE, MM | |

Setelah KPUD menetapkan peserta pasangan calon walikota dan wakilnya berdasarkan nomor urut, maka masa kampanye secara resmi berlangsung dari tanggal 08 s/d 21 Oktober 2008 dengan bentuk kampanye dibagi dalam dua bentuk, yaitu *Pertama*, penyampaian visi misi dan program pasangan calon pada rapat paripurna DPRD Kota Pontianak. *Kedua*, kampanye damai untuk seluruh pasangan calon oleh KPU Kota Pontianak. Proses kampanye berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KPUD dengan bentuk kampanye bermacam-macam yang dilakukan oleh masing-masing pasangan seperti mendatangi rumah-rumah warga, kerja bakti bersama masyarakat, sampai pada orasi dilapangan terbuka.

Dalam kampanye tersebut, masing-masing pasangan memiliki slogan untuk menarik calon pemilih. Calon pasangan perseorangan Drs. H. Moh. Haitami Salim, M. Ag - Ir. H. Gusti (Deden) Hardiansyah, M.Sc, QAM memiliki slogan "HADE" (Haitami - Deden), pasangan drg. Oscar Primadi, MPH - Drs. Hartono Azas, MBA yang diusung dari PKB dan Demokrat memiliki slogan "OBAMA" (Oscar bersama Azas), pasangan Ir. H. Muhammad Abduh - Muhammad Thaha, SH yang diusung dari PKS dan PAN memiliki slogan "DUTA" (Abduh - Thaha), pasangan H. Sutarmidji, SH, M. Hum - Paryadi, S. Hut yang diusung dari PPP dan PKPI memiliki slogan "SIIP" (Sutarmidji - Paryadi), pasangan Ir. Harso Utomo Suwito - H. Awaluddin Rahmat yang diusung dari koalisi partai memiliki slogan "HARKAT" (Harso - Kalut), pasangan H. Gusti Hersan Aslirosa, SE - Setiawan Lim, SH yang diusung dari partai Golkar memiliki slogan "GHESIT" (Gusti Hersan - Sertiawan Lim), dan pasangan Dra. Sri Astuti Buchary, M. Si - H. Eka Kurniawan, SEE, MM yang diusung dari PDIP memiliki slogan "PSK" (Pasangan Setia Kawan).

Dalam pilkada yang diselenggarakan pada tanggal 25 Oktober 2008 untuk memilih orang nomor satu dan nomor dua di Kota Pontianak, peran symbol etnis menurut hemat saya sangat menentukan calon menjadi walikota terpilih. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh badan penelitian dan pengembangan Provinsi Riau dengan PT Wastu Asrindo

Riau, ditemukan beberapa penyebab konflik yang kemudian diklasifikasikan menjadi dua hal: *Pertama*, penyebab identitas yang dilihat dari persoalan ideologi, ras, etnik. *Kedua*, perbedaan yang dapat dilihat berdasarkan distribusi sumber daya ekonomi, politik, social dan hukum beserta turunannya.

Melihat pemilihan Wali Kota Pontianak 2008, tentu saja kedua klasifikasi tersebut menjadi acuan untuk melihat kemungkinan hasil pemilihan dan konflik yang muncul setelah pemilihan dilaksanakan. Menurut hasil analisis Usman Yasin ada 7 (tujuh) potensi penyebab terjadinya konflik, yaitu (1). Tidak akuratnya data pemilih, (2). Persyaratan administrasi pasangan calon yang tidak lengkap, (3). Permasalahan internal parpol terhadap penetapan pasangan calon, (4). Adanya kecendrungan KPU daerah yang tidak independent, (5). Adanya dugaan *money politic*, (6). Pelanggaran terhadap rambu-rambu penyelenggaraan pilkada, dan (7). Perhitungan suara yang tidak akurat. Oleh karenanya 7 (tujuh) potensi konflik di atas perlu diantisipasi agar pilwako Kota Pontianak mampu menghasilkan pemimpin yang dipilih secara demokratis.

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**DIMENSI ETNIK DALAM KEHIDUPAN POLITIK:
Studi Tentang Preferensi Tokoh Etnis
Dalam Pemilihan Walikota Pontianak**

*Ethnic Dimension in Political Life:
A Study on Ethnic Preference in the Election of Pontianak Mayor*

Eka Hendry Ar (Penanggungjawab merangkap Anggota)
M. Rahmatullah (Ketua merangkap Anggota)
Hermansyah (Anggota)
Segu (Anggota)
Suhaimi (Anggota)



CENTER FOR ACCELERATION OF INTER RELIGIOUS AND ETHNIC UNDERSTANDING
(CAIR&U) STAH PONTIANAK TAHUN 2008

BAB IV

PREFERENSI TOKOH ETNIK

A. Gambaran Umum

Isu etnik dan agama merupakan dua isu yang sangat populer ketika terjadi peristiwa politik, terutama pemilihan kepala daerah, di Kalimantan Barat. Berbagai cara untuk menyebarkan isu tersebut, baik secara lisan maupun tulisan. Sejumlah selebaran yang berkaitan dengan isu itu bertebaran di mana-mana. Selebaran yang berkaitan dengan isu tersebut sudah menyebar jauh hari sebelum pemilihan kepala daerah. Ketika pemilihan gubernur tahun lalu (2007) sejumlah selebaran membuktikan kebenaran isu itu. Di kalangan orang Dayak misalnya beredar selebaran yang bunyinya sebagai berikut:

Saudara-SaudaraKu Aku Tak bisa hadir di tengah-tengah kalian. Ketika Aku Menulis Kata-kata ini TANGANKU BERGETAR!! Beritahu Pada Saudara-Saudaramu Bahwa Sejarah Harus Berulang Yakni DAYAK Harus Menjadi GUBERNUR Kalbar. Masih membekas Dalam IngatanKU Ketika 40 Tahun Yang Lalu Kalbar Dipimpin Oleh GUBERNUR DAYAK I JC. OEVANG OERAY, Dunia Mengakui Keberadaan DAYAK Karena Ada Putra Terbaik DAYAK mampu memimpin Kalbar...dst...¹

Kalangan elit umat Islam, melalui Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat, memberikan dukungan kepada salah satu pasangan Islam-Kristen yakni Usman Jafar dan Laurentius Herman Kadir. Dukungan ini tentu saja dimaksudkan agar pasangan tersebut dapat memenangkan pilkada. Walaupun akhirnya karena protes berbagai pihak, terutama kandidat Muslim lainnya, dukungan tersebut ditarik kembali.

¹ Selebaran ini ditemukan di desa Gombang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak pada awal tahun 2007. Pemilihan gubernur berlangsung pada bulan november 2007 (Hermansyah 2009)

Tabel 4.1

| No | Pasangan Kandidat | Etnis/Agama |
|----|-------------------------|--------------------|
| 1 | Akil Mochtar | Melayu/Islam |
| | Anselmus Robertus Mecer | Dayak/Kristen |
| 2 | Usman Djafar 37 | Melayu/Islam |
| | Laurentius Herman | Dayak/Kristen |
| 3 | Oesman Sapta | Bugis-Padang/Islam |
| | Ignatius Lyong | Dayak/Kristen |
| 4 | Cornelis | Dayak/Kristen |
| | Christiandy Sanjaya | Tionghoa/Krsiten |

Selain itu sejumlah selebaran yang berkaitan dengan pilkada di Kalimantan Barat juga beredar. Salah satunya dikeluarkan oleh Forum Advokasi Rehabilitasi Imunisasi Aqidah yang Terpadu Efektif dan Aktual (Arimatea) menjelang berlangsungnya Pilwako Pontianak. Selebaran itu berisi ajakan untuk memilih calon yang beragama Islam yang diusung oleh partai yang berbasis dakwah dan agama. Berbagai alasan dikemukakan terutama berdasarkan alasan yang bersifat ideologis. Selebaran tersebut sempat menjadi pembicaraan hangat di kalangan umat Islam di Kota Pontianak. Berbagai reaksi yang muncul baik mendukung maupun menolak.

B. Diskusi

1. Peranan Tokoh Etnik dalam Pilwako

Lingkar Survei Indonesia (LSI) dalam kajian bulanan Edisi 09 yang diterbitkan bulan Januari 2008 secara khusus menggambarkan faktor etnik dalam pemilihan kepala daerah di Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Bangka Belitung. Menurut LSI, faktor etnik tampak memainkan peranan yang penting. Pemilih cenderung memilih kandidat yang berasal dari etnik yang sama. Sedangkan, di Sulawesi Selatan dan Bangka Belitung faktor etnik agak berkurang peranannya dibandingkan dengan di Kalimantan Barat.

Isu etnik dalam pemilihan walikota Pontianak pada tahun 2008 adalah etnik Melayu, Tionghoa, Jawa, Bugis dan Madura (lihat tabel 2.1. dan 2.2 pada Bab II). Kebetulan ada calon yang berasal dari keempat etnik tersebut.

Tabel 4.2
Etnik Calon Walikota dan Wakil walikota

| No | Pasangan Kandidat | Etnis/Agama |
|----|---------------------------------------|---|
| 1 | Moh. Haitami Gusti Hardiansyah | Melayu-Bugis/Islam Melayu/Islam |
| 2 | Oscar Primadi Hartono Azas | Melayu/Islam Tionghoa/Kristen |
| 3 | M. Abduh M. Taha | Melayu/Islam Melayu/Islam |
| 4 | Sutarmidji Paryadi | Melayu/Islam Madura/Islam |
| 5 | Gusti Hersan Aslirosa Setiawan Lim | Melayu/Islam Tionghoa/Kristen |
| 6 | Harso Utomo Suwito Awaludin Rahmat | Tionghoa/Kristen Melayu-Bugis /Islam |
| 7 | Sri Astuti Eka Kurniawan | Jawa/Islam Melayu/Islam |

Pilwako tersebut dimenangkan oleh pasangan nomor urut empat yaitu Sutarmidji dan Paryadi dalam sekali putaran. Hasil ini mengejutkan banyak orang, sebab jumlah orang Melayu-Bugis hanya 39,25% (lihat tabel 2.3) sementara calon yang berasal dari etnik tersebut ada di semua pasangan. Banyak orang memprediksikan bahwa yang akan menjadi pemenangnya adalah pasangan nomor urut enam karena merupakan satu-satunya kandidat walikota Tionghoa atau paling tidak akan terjadi dua putaran. Selebihnya hanya menjadi calon wakil walikota. Lalu apa sebenarnya yang menjadi dasar seseorang menentukan pilihannya? Penelitian ini berusaha mengungkap peran tokoh etnik dalam pemilihan walikota Pontianak tahun 2008.

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan Focus Group Discussion dengan para tokoh etnik yang terlibat dalam pemilihan

walikota yakni Melayu, Bugis, Madura, Jawa, dan Tionghoa. Selain itu juga diwawancarai tokoh etnik lain seperti Batak, Dayak dan Arab untuk mengetahui pandangan mereka sebagai bandingan.

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dapat dinyatakan bahwa para tokoh etnik menjadikan etnik sebagai pertimbangan dalam pemilihan walikota Pontianak dengan kadar yang berbeda. Di kalangan tokoh etnik yang ada calon yang berasal dari etnik mereka peran etnik sangat kuat. Berikut pernyataan beberapa tokoh:

Walaupun sebenarnya dalam pilkada itu (faktor etnik) akan tetapi kalau sekarang sudah demikian ya...mau ndak mau kita harus jalankan juga sistem apa namanya...Melayu-Dayak-Cina (MDC) atau DCM (Dayak-Cina-Melayu). (AZ, tokoh Melayu, wawancara 03/12/2008).

Hal yang sama juga dinyatakan oleh tokoh muda Madura berikut: (faktor etnik) itu wajib dipertimbangkan. Karena etnis itu yang saya rasakan juga. Memang selama ini Madura seakan-akan tidak ada, dan mereka khususnya Madura pasti melihat figur Madura. (F, tokoh muda perempuan Madura, wawancara 20/11/2008).

Senada dengan kedua pendapat tersebut tokoh-tokoh etnik Bugis dan Jawa membenarkan pendapat tersebut:

(faktor etnik) juga menjadi suatu pertimbangan, karena pada dasarnya sekarang ini adalah masa transisi, primordial muncul, terjadi euforia untuk saling menampilkan etnisnya. (AI, Tokoh Bugis, Wawancara 23/11/2008)

Saya pernah didatangi oleh salah satu tim agar komunitas Jawa memilih dan menemui calon walikota Jawa, walaupun kenyataannya orang Jawa

tidak banyak mendukung calon tersebut karena dia tidak menunjukkan dirinya sebagai orang Jawa. (K, tokoh Jawa, Wawancara 20/11/2008)

Sementara itu selain faktor etnik, di kalangan orang Tionghoa, faktor marga juga dipertimbangkan. Seperti dinyatakan oleh seorang tokoh berikut :

Jika ada calon (Tionghoa) lebih dari satu, maka orang tionghoa akan menjadikan marga sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihan. (M, tokoh Tionghoa, wawancara 21/11/2008).

Begitu pentingnya faktor etnik ini seorang tokoh etnik Batak mengaku memilih salah satu calon walikota yang istrinya satu etnik dengan tokoh tersebut.

Saya pilih DUTA (pasangan Abduh dan Taha), karena istrinya satu marga (E, tokoh Perempuan Batak, wawancara 22/11/2008)

Walaupun demikian tidak semua tokoh menjadikan etnik sebagai dasar dalam menentukan pilihan. Beberapa tokoh menyatakan bahwa memilih kepala daerah seharusnya tidak berdasarkan atas alasan primordial. Berikut pernyataan beberapa tokoh tersebut.

Saya memilih figur yang saya senang, tidak mengaitkan harus begini. Tidak ada kaitan dengan agama, suku. Karena dia orang Melayu, Dayak, Tionghoa..ndak ada. Intinya saya senang, tidak bisa dipaksakan (SR, tokoh Dayak, wawancara 05/12/2008).

Pernyataan serupa dikemukakan oleh tokoh Arab berikut:

Sebenarnya mengaitkan isu etnik dalam pemilihan tidak dapat dibenarkan, karena bisa memicu terjadinya konflik antar etnis dan golongan hanya gara-gara kepentingan-kepentingan dari sebagian orang. (IA, wawancara 02/12/2008).

Dalam masyarakat yang masih tergantung pada kelas elit, maka peranan para tokoh masyarakat sangat penting. Mereka umumnya merupakan kelas menengah masyarakat yang menentukan sikap anggota. Peranan itu melingkupi banyak hal termasuk dalam hal politik.

Pada pilwako Pontianak, peranan itu antara lain nampak ketika mereka diminta pendapat komunitasnya dalam menentukan pilihan.

Saya pernah diminta pertimbangan oleh masyarakat. Tapi saya sih hanya mengatakan pilihlah sesuai hati nurani. Tetapi dalam hal ini bukan masalah hati nurani saja, masalah kinerja dan moral juga perlu dipertimbangkan. (AH, tokoh Melayu, Wawancara 25/11/2008).

Hal senada juga dinyatakan oleh tokoh Dayak berikut :

Saya sering diminta saran untuk memilih siapa. Karena kitakan bergaul dengan berbagai kalangan. Saya selalu bilang, itu tadi, kita ini mencari pemimpin yang bisa membawa kepada keadaan menjadi lebih baik, maka penting itu orang yang jujur, bersih, kemampuan manajerial. Akan tetapi saya tidak pernah menyebut namanya (EP, Wawancara 18/11/2008).

Pentingnya sikap para tokoh ini bagi komunitasnya menyebabkan para kandidat berkepentingan untuk mendatangi para tokoh. Sebagian kandidat meminta restu kepada para tokoh. Bahkan, sebagian lagi

berusaha melibatkan tokoh tersebut sebagai tim suksesnya seperti dinyatakan oleh seorang informan berikut :

Kemarin ada tiga tim yang datang meminta saya untuk menjadi tim sukses, namun karena pertimbangan tertentu saya menolaknya. (IM, tokoh Jawa, wawancara 25/11/2008)

Hal serupa dinyatakan informan lain :

Karena ada wakil walikota yang berasal dari etnis Madura, masyarakat (Madura) jadi semangat. Saya merupakan ketua tim sukses khusus di kalangan Madura. Mari kita bersama ikut serta dalam politik ini dan mendukung Paryadi, karena sekarang kesempatan kita. (S, tokoh Madura, wawancara, 22/11/2008).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa para tokoh etnik sangat berperan dalam memperkuat isu etnik dan agama dalam *event* politik, khususnya pemilihan kepala daerah, seperti pemilihan walikota. Para tokoh etnik merupakan agen penting yang menyebarkan sentimen etnik dan agama dalam pilwako. Penyebaran isu itu dilakukan dengan berbagai cara seperti himbauan lisan, SMS, dan selebaran.

2. Pertimbangan Tokoh Etnik dalam Menentukan Pilihan

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi yang dilakukan menunjukkan beragam pendapat para tokoh tentang preferensi dalam pemilihan Walikota. Secara umum dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk pilihan, yaitu; pilihan berdasarkan pertimbangan agama, pertimbangan berdasarkan etnis, pertimbangan berdasarkan faktor ketokohan (*figure*) dan pertimbangan berdasarkan hal-hal yang bersifat pragmatis. Walaupun ketiga pertimbangan tersebut menunjukkan mungkin berlapis-lapis. Seorang tokoh yang menentukan pilihan berdasarkan etnik,

pada saat yang bersamaan juga mempertimbangkan agama kandidat. Demikian juga halnya seseorang yang mempertimbangkan ketokohan kandidat pada saat yang sama juga mempertimbangkan etniknya, dan seterusnya.

Pada etnis Melayu kecenderungan pilihan didasarkan kepada obsesi bahwa, Kota harus dipimpin oleh orang Melayu dan beragama Islam. Sebagaimana diketahui di Kalimantan Barat isu etnik di kalangan masyarakat lokal hampir tidak bisa dipisahkan dari agama. Sehingga Melayu identik dengan Islam dan Dayak identik dengan kristen. Identifikasi itu ternyata juga terbawa ke dalam wilayah politik. Hampir semua tokoh etnik beragama Islam menyatakan pentingnya agama dijadikan sebagai pertimbangan menentukan pilihan calon walikota. Khusus di kota Pontianak dasar pertimbangan memilih calon walikota bagi para tokoh Melayu/Islam adalah karena di Kota Pontianak dianggap sebagai kota dengan sejarah yang didirikan oleh kesultanan Islam (Keraton Kadariyah) dan sebagian besar juga penduduknya adalah dari etnis Melayu dan beragama Islam. Salah satu pernyataan ini dinyatakan secara implisit oleh seorang tokoh Melayu berikut Imien Thaha berikut :

“Aaa.. itu ada, Tetapi saya hanya menyarankan bahwa kalian memilih itu harus sesuai dengan hati nurani masing-masing. Kalau dalam hati nurani sudah ada pilihan, saya tidak ingin mencampuri, tidak etis itu...Dalam pemilihan Walikota ini, saya hanya menegaskan, jangan pernah melupakan History nya kota Pontianak. Dari sejak zaman orde lama sampai orde baru dan sampai sekarang tidak pernah ada yang namanya Walikota Pontianak itu yang non Islam, dan pendiri kota Pontianak adalah mayoritas Islam” (IT, wawancara, 20/11/2008)

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh tokoh Melayu yang lain bahwa, khusus untuk Kota Pontianak faktor agama dan etnis mayoritas itu tetap harus diperhatikan.

“Aspek Agama sangat menentukan dalam kepemimpinan, pemimpin itu ditentukan oleh siapa yang mayoritas, itu tidak bisa tidak” (ZA, wawancara 03/12/2008)

Jadi, secara eksplisit para elit Melayu tetap menghendaki bahwa, yang terpilih adalah dari kalangan Melayu dan beragama Islam. Tapi kalau dibuat distingsi antara kedua pilihan tersebut, sebagian besar elit lebih memilih mengutamakan pertimbangan agama Islam sebagai dasar pilihan utama. Untuk dapat memahami dasar preferensi ini sebenarnya harus juga dilihat dalam kerangka yang lebih besar, yaitu konstelasi politik secara keseluruhan di Kalbar. Pertama, disebagian besar daeran (Kab dan Kota) yang didominasi oleh mereka yang beragama non-Muslim, sebagian besar kepala daerahnya adalah dari kalangan non-Muslim. Dan juga merepresentasikan kelompok etnis Mayoritas di tempat tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka kota Pontianak dengan sejarah dan konfigurasi penduduk yang mayoritas Melayu dan beragama Islam, sudah selayaknya menjadi dasar agar orang Melayu dan beragama Islam yang memimpin Kota Pontianak. Kedua, Terpilihnya Cornelis dan Christiandy Sanjaya sebagai Gubernur Kalbar dinilai sebagai “pukulan telak” bagi masyarakat Melayu dan Ummat Islam Kalimantan Barat. Karena dari segi komposisi penduduk, orang Islam mengklaim mereka adalah penganut agama Mayoritas. Oleh karenanya, ada semacam “sindrom” tidak boleh kalah untuk kedua kalinya, sehingga “wajib” hukumnya di Kota Pontianak yang terpilih adalah Orang Melayu dan beragama Islam.

Bahkan, ada di antara tokoh yang menyebut alasan yang bersifat ideologis yang berasal dari ajaran agama sebagai dasar penentuan pilihannya seperti yang dinyatakan oleh tokoh keturunan Arab² berikut :

Pilihan kita (dalam pilwako) tentu berdasarkan hukum Allah. Jika kita berbicara dengan hukum Allah maka sudah jelas standarnya adalah iman.

(S, tokoh Arab, wawancara, 02/12/2008)

² Sebagaimana sudah dinyatakan bahwa Islam identik dengan Melayu. Melayu dalam batas-batas tertentu juga terdiri dari orang Jawa, orang Bugis, orang Banjar dan beberapa etnik lain yang sudah lama di Kalimantan Barat. Demikian juga halnya dengan keturunan Arab. Komunitas keturunan Arab sering dihitung sebagai Melayu. Kenyataannya beberapa tokoh keturunan Arab menjadi pengurus Majelis Adat Budaya Melayu (MABM). Demikian juga halnya dengan etnik-etnik lain, kecuali Madura.

Jika dipilah antara etnik dan agama, maka etnik merupakan lapisan luar dari agama ketika seseorang menentukan pilihannya. Etnik dijadikan pertimbangan setelah agama atau menjadi bungkus agama. Kadang-kadang isu yang muncul ke permukaan hanya etnik, namun dibalik itu agama merupakan faktor yang menentukan. Bagi tokoh etnik kecil aspek kesukuan tidak terlalu ditonjolkan ketika keluar. Hal ini dilakukan karena tidak terlalu menguntungkan dari sisi jumlah. Oleh karena itu, dukungan para tokoh etnik kepada calon yang berasal dari etnik kecil itu hanya menjadikan isu etnik tersebut di kalangan internal. Sementara keluar mereka lebih menyebut tokoh sebagai tokoh agama atau tokoh etnik yang lebih besar bilangannya, misalnya Islam dan Melayu. Begitu juga dengan etnik yang tidak memiliki wakil yang bertarung pada pilwako yang lalu.

Masyarakat Tionghoa di Kota Pontianak semula diduga akan menyalurkan pilihannya pada pasangan Harso dan Awaludin Rahmad. Karena Harso merupakan salah satu kandidat dari etnis Tionghoa yang menduduki posisi Walikota, bukan wakil seperti halnya Hartono Azas dan Setiawan Lim yang masing-masing menjadi wakil Walikota pasangan Oscar Pribadi dan Gusti Hersan Aslirosa. Pengalaman ini didasarkan pada pemilihan Gubernur Kalbar. Namun, yang terjadi kemudian bahwa, sebagian besar orang Tionghoa lebih memilih mencari aman (sebagai bentuk pertimbangan pragmatis) dengan memilih pasangan Sutarmidji dan pasangan lain, dimana orang Tionghoa jadi orang nomor dua, walaupun ditingkat kesadaran para tokoh Tionghoa ini menjadikan agama dan etnik sebagai pertimbangan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari lapangan menunjukkan beberapa indikator berikut; *Pertama*, orang-orang Tionghoa lebih memilih tidak merebut posisi utama, dan mendukung pasangan yang dinilai dapat memberikan rasa aman bagi mereka. Pasangan tersebut adalah pasangan *incumbent* dan pasangan campuran Melayu-Cina; *Kedua*, ada informasi yang berkembang di masyarakat bahwa, dalam masa-masa sebelum

pencoblosan berkembang isu yang kuat bakal terjadi *chaos* di Kota Pontianak jika pasangan Harso yang terpilih. Peneliti juga mendapat informasi bahwa, berkembang berbagai bentuk ancaman terhadap masyarakat Tionghoa untuk tidak memilih pasangan nomor enam. Namun, kebenaran informasi ini sukar untuk diverifikasi secara empiris, karena bersifat sangat rahasia (bersifat provokatif dan ke arah isu disintegrasi bangsa). Berdasarkan hasil kajian di CAIREU STAIN Pontianak memang berkembang beberapa pandangan, atau lebih tepatnya semacam kekhawatiran bahwa, potensi konflik akan lebih besar terjadi manakala pasangan Harso menang, karena ini ada kaitannya dengan rangkaian “kegagalan” etnis tertentu dalam pemilihan Gubernur Kalbar. Salah satu peristiwa konflik yang dirujuk sebagai penanda bagi ancaman konflik tersebut adalah konflik yang terjadi di Gang 17 (dikenal dengan istilah konflik Gang 17) yang dinilai merupakan masih menyisakan residu bagi konflik lain dengan eskalasi yang lebih besar.³ Berikut penuturan seorang tokoh Tionghoa :

Agama dan etnik tentu menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam pilwako yang lalu, namun sebagian orang Tionghoa masih trauma dengan peristiwa gang 17⁴. Oleh karena itu, orang Tionghoa lebih memilih aman daripada memilih calon walikota Tionghoa, tetapi akibatnya terjadi kerusuhan. (AI, tokoh Tionghoa, wawancara, 23/11/2008).

Ketakutan etnik Tionghoa ini bisa ditelusuri dalam sejarah panjang Kalimantan Barat. Pada tahun 1967 militer Indonesia berusaha membersihkan Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS). Anggota PGRS tidak hanya ada di wilayah Malaysia, tetapi juga di pedalaman

³ Harian Borneo Tribune menjadikan hasil diskusi ini menjadi headline pada pertengahan Agustus 2008 dengan judul “Masih Ada Residu Kasus Gang 17”.

⁴ Lihat bab II penelitian ini. Lengkapnya lihat laporan peristiwa tersebut dalam http://andreasharsono.blogspot.com/2008/07/panasnya-pontianak-panasnya-politik_05.html

Kalimantan, termasuk Kalimantan Barat. Sebagian besar anggota PGRS adalah pemuda Tionghoa. Tentara tidak sanggup membasmi PGRS, maka mereka merekrut orang Dayak. Maka terjadilah pembantaian tentara dan Dayak terhadap orang-orang Cina dari pedalaman Kalimantan. Jamie Davidson dalam disertasinya, bahkan menyebut pembantaian tahun 1967 itu sebagai akar kekerasan di Kalimantan Barat. Sejak saat itu tidak ada lagi orang Tionghoa di kampung-kampung pedalaman Kalimantan Barat.

Ketiga, ada juga di kalangan orang-orang Tionghoa yang berpandangan bahwa, sudah cukuplah bagi mereka menjadi orang nomor dua di Pemerintahan Provinsi Kalbar, dan berikan kesempatan kepada etnis Melayu untuk memimpin Kota Pontianak. Berdasarkan beberapa reasoning di atas, memperlihatkan bahwa, kecenderungan preferensi orang Tionghoa dalam pemilihan Walikota Pontianak tahun 2008 lebih bersifat pragmatis, ketimbang berdasarkan kesadaran ideologis agama maupun pertimbangan etnis.

Kelompok etnis yang paling solid pilihannya adalah etnis Madura. Dukungan tokoh etnis Madura umumnya ke pasangan Sutarmidji dan Paryadi, dimana Paryadi berasal dari etnis Madura. Dasar pilihan terhadap Paryadi, ini sebenarnya tidak semata karena faktor Paryadi dari etnis Madura, akan tetapi faktor ketokohan orang tua dan paman dari Paryadi di kalangan orang Madura. Soliditas suara dari etnis Madura juga berdasarkan pada pertimbangan keamanan, mengingat sejarah konflik antar kelompok etnis di Kalbar, beberapa kali melibatkan etnis Madura.⁵ Dengan naiknya Paryadi yang berpasangan dengan Sutarmidji (yang diasumsikan sebagai representasi kekuatan politik Melayu) diharapkan keamanan orang-orang Madura, terutama di Kota Pontianak akan lebih terjamin. Hal ini juga terbukti, ketika pemilihan Gubernur Kalimantan Barat tahun 2007 lalu. Etnis Madura (terutama yang ada di Kota Pontianak) mayoritas dukungan diberikan kepada pasangan Cornelis dan

⁵ Salah satu janji kampanye Conelis adalah memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat minoritas dan terpinggirkan (lihat Sinar Harapan 27 November 2007)

Chistiandy Sanjaya (nota bene dari etnis Dayak dan Cina). Bahkan, beberapa tokoh Madura secara terang-terangan mendukung Cornelis selama kampanye. Konsistensi dukungan yang solid ini juga berlangsung dalam pemilihan walikota Pontianak. Tentu dengan alasan yang berbeda. Kalau pada saat pemilihan Gubernur, karena mereka “berkeyakinan” bahwa, Cornelis memberikan garansi kepada orang-orang Madura, tidak akan terjadi konflik etnis lagi.

Selain itu, pada saat pemilihan Walikota kali ini, kebetulan hanya ada satu tokoh Madura yang tampil sebagai calon wakil walikota, maka mereka menganggap ini sebagai *moment* yang tepat untuk mendukung dari kalangan sendiri. Bagi mereka sekaranglah saatnya untuk menunjukkan eksistensi orang Madura di Pontianak. Selama ini, di kalangan orang Madura sendiri berkembang anggapan bahwa mereka tidak diberi peran yang lebih baik oleh kelompok etnik lain dalam bidang-bidang tertentu. Mereka hanya diberi kesempatan bekerja di sektor non formal seperti tukang, pedagang kaki lima dan sejenisnya. Dengan demikian, terjadi penguatan di kalangan etnik Madura, termasuk dalam pemilihan walikota. Untuk menggalang solidaritas di kalangan orang Madura, mereka membuat tim sukses khusus. Berikut pernyataan tokohnya :

Karena ada wakil walikota yang berasal dari etnis Madura, masyarakat (Madura) jadi semangat. Saya merupakan ketua tim sukses khusus di kalangan Madura. Mari kita bersama ikut serta dalam politik ini dan mendukung Paryadi, karena sekarang kesempatan kita. (S, tokoh Madura, wawancara, 22/11/2008).

Saya memilih pasangan Sutarmidji-Paryadi karena ada rasa solidaritas, sama-sama Madura, dan masih muda lagi. Saya menyarankan kepada orang Madura untuk memilih orang Madura. Orang Madura harus bersatu, karena selama ini kita termarjinalkan. Jadi kesempatan kita sekarang untuk maju. (FA, tokoh Madura, wawancara, 22/11/2008).

Sementara itu, kecenderungan yang terjadi pada kelompok-kelompok etnis kecil (di luar Melayu dan Cina) seperti Dayak, Bugis, Jawa dslb., cenderung berdasarkan kepada pertimbangan kesamaan agama dan pertimbangan figur (personal). Mereka yang beragama Islam, lebih cenderung mendasarkan pilihannya kepada yang beragama Islam, terlebih lagi jika dari kelompok etnis tersebut tidak ada yang dicalonkan menjadi kandidat. Dalam kasus masyarakat Bugis, dimotori oleh KKSS., meskipun tidak secara formal, beberapa elit Bugis di Kota Pontianak memberikan dukungan kepada pasangan Moh. Haitami Salim dan Deden dan sebagian kepada pasangan lain. Meskipun ada Awaludin dari etnis Bugis, namun karena ia berpasangan dengan Harso (dari etnis Tionghoa) dan kemudian ia di posisi nomor 2 (wakil) maka, kurang berhasil menarik simpati atau dukungan dari etnis Bugis. Pada etnis Dayak, secara formal dikatakan bahwa lembaga adat tidak berpihak kepada siapapun. Seperti dinyatakan oleh Temenggung Adat Dayak, ketika ditanya tentang bagaimana keterlibatan perangkat-perangkat adat dalam persoalan politik dan mengarah dukungan.

"Lembaga Adat Dayak ini kan Netral. Kalaupun ada itu individu, bukan membawa lembaga atau etnis. Berpolitik itu kan bebas, hak setiap orang, tetapi tidak boleh membawa nama etnis/lembaga adat". (SA, tokoh Dayak, wawancara, 05/12/2008).

Namun, kalau kita melihat jejak rekam partisipasi politik orang Dayak dan kecenderungan identitas etnis di Kalbar, maka kemungkinan besar sebagian dari orang Dayak memilih dari kalangan non-Muslim. Terlebih lagi, calon dari Etnis Dayak, Injek Barayukng yang berpasangan dengan M. Rifal (pasangan *independent*) gagal dalam seleksi awal pencalonan.

Pertimbangan memilih berdasarkan kesamaan agama dan pertimbangan figur (personal) juga terlihat pada tokoh Jawa. Kasus

kandidat nomor enam yang menempatkan Sri Astuti yang nota bene dari etnis Jawa, tidak berhasil menyedot dukungan dari etnis Jawa. Dalam kasus ini, dasar pilihan lebih kepada pertimbangan faktor ketokohan (figure). Seperti salah satu contoh pernyataan berikut:

Saya melihat Sutarmidji cukup strategis dalam mengambil langkah, ketika suara Melayu terpecah, Cina juga terpecah, maka beliau harus mencari suara yang tidak terpecah. Sebagaimana kita ketahui kota Pontianak ini kan terdiri dari dominasi Cina, Melayu dan Madura dan sebagian juga Jawa. Mungkin pertimbangan Sutarmidji memilih Paryadi, pertama dia memang orang Madura, kemudian yang kedua bapaknya merupakan orang yang berpengaruh dalam masyarakat Madura. Kemudian mungkin bukan dari faktor etnik, orang ini kan (Sutarmidji-ed) berjuang udah dari empat tahun yang lalu, dengan bantuan-bantuan berupa semen, pasir, pembangunan jalan-jalan, itu pengaruhnya luar biasa sekali. Dan dari figurnya juga kan beliau cukup dikenal dalam masyarakat. (IM, tokoh Jawa, Wawancara 25/11/2008).

LAPORAN HASIL PENELITIAN

DIMENSI ETNIK DALAM KEHIDUPAN POLITIK: Studi Tentang Preferensi Tokoh Etnis Dalam Pemilihan Walikota Pontianak

*Ethnic Dimension in Political Life:
A Study on Ethnic Preference in the Election of Pontianak Mayor*

Eka Hendry Ar. (Penanggungjawab merangkap Anggota)
M. Rahmatullah (Ketua merangkap Anggota)
Hermansyah (Anggota)
Segu (Anggota)
Suhaimi (Anggota)



CENTER FOR ACCELERATION OF INTER RELIGIOUS AND ETHNIC UNDERSTANDING
(CAIREU) STADIA PONTIANAK TAHUN 2008

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian terdahulu dapat disimpulkan bahwa, *pertama*; para tokoh etnik sangat berperan dalam memperkuat isu etnik dan agama dalam event politik, khususnya pemilihan kepala daerah, seperti pemilihan walikota. Para tokoh etnik merupakan agen penting yang menyebarkan sentimen etnik dan agama dalam pilwako. Penyebaran isu itu dilakukan dengan berbagai cara seperti himbauan lisan, SMS, dan selebaran. Namun demikian, harus juga dikritisi seringkali elit bersifat mendua, dalam beberapa hal terkadang elit berlaku "kurang jujur". Mereka dapat menutupi sikap dan pandangan mereka yang sesungguhnya di balik kemampuan berdiplomasi dan retorika politik. Hal ini disadari pula oleh beberapa tokoh etnis itu sendiri.

Kedua, beragam pendapat para tokoh tentang preferensi dalam pemilihan Walikota Pontianak. Secara umum dapat dikategorikan ke dalam empat bentuk pilihan, yaitu; pilihan berdasarkan pertimbangan agama, pertimbangan berdasarkan etnis, pertimbangan berdasarkan faktor ketokohan (figure) dan pertimbangan berdasarkan hal-hal yang bersifat pragmatis. Munculnya dasar pilihan itu sangat erat kaitannya dengan sejarah panjang pembentukan identitas serta pertarungan politik di Kalimantan Barat. Selain itu, sejarah konflik yang melibatkan sebagian etnik yang turut serta dalam pertarungan pilwako juga menentukan kecenderungan pilihan para tokoh etnik.

B. Saran

Penelitian ini belum menjelaskan semua faktor yang mempengaruhi pemilih pada pilwako Pontianak tahun 2008. Faktor-faktor lain seperti partai politik, uang, *incumbent*, keamanan, dan berbagai faktor lain sangat mungkin mempengaruhi pilihan para tokoh etnik. Oleh karenanya diperluka sebuah

penelitian lanjutan yang lebih spesifik terhadap persoalan-persoalan yang muncul dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Andreas Harsono. 2008. http://andreasharsono.blogspot.com/2008/07/panasnya-pontianak-panasnya-politik_05.html diakses 25-11-2008.
- Ansar Rahman et al. 2000. *Syarif Abdurrahman Alkadri, Perspektif Sejarah Berdirinya Kota Pontianak*. Pontianak: Pemerintah Kota Pontianak.
- Arenawati. 1989. *Syair Pangeran Syarif*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia
- Agus Salim (peny), 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Pemikiran Norman K. Denzin dan Egon Guba dan Penerapannya)*, Tiara Wacana Yogya.
- Ambo Upe, 2008, *Sosiologi Politik Kontemporer : Kajian Tentang Rasionalitas Perilaku Politik Pemilih di Era Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2001. *Kalimantan Barat dalam Angka 2000*. Jakarta: BPS.
- Hermansyah. 2006. *Alam Orang Melayu: Kajian Ilmu di Embau, Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Indonesia*. Disertasi pada Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia.
- King, V. T. 1993. *The peoples of Borneo*. Oxford: Blackwell.
- Pontianak Post. 2007. Kasus Gang 17, Korban-Tersangka Sepakat Damai. Senin 24 Desember.
- Sutini Ibrahim. 1996. Senganan. Makalah seminar sehari dalam rangka Festival Istiqlal II-1995 Daerah Kalimantan Barat. 29 Agustus.
- Syarif Ibrahim Alqadrie. 2002. *Interaksi Unsur-unsur Budaya Masyarakat Sebagai Sasaran Penelitian Bidang Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Pusjarlit dan Pusjardimas pada IAIN dan STAIN se-Indonesia di Pontianak oleh STAIN Pontianak.
- Yusriadi dan Hermansyah. 2003. *Orang Embau: Potret Masyarakat Pedalaman Kalimantan*. Pontianak: STAIN Press & The Ford Foundation.

Internet :

- Andreas Harsono. 2008. http://andreasharsono.blogspot.com/2008/07/panasnva-pontianak-panasnya-politik_05.html diakses 25-11-2008
- Alfan Alfian. Elite (dalam Pelita. 21 Desember 2007). Diakses dari <http://alfanalfian.multiply.com/journal/item/215/Elite> pada hari Jum'at , 2 Januari 2009.
- Enoch Markum (2004) Paper, "Konflik Antar kelompok Dalam Perspektif Psikologi", Jakarta. dalam Ichsan Malik, "Kontribusi Psikososial dalam Penanganan Konflik" pada [http:// www.ui.ac.id/indonesia/ main.php? hlm=berita&id=2005-03-03%2015:15:06](http://www.ui.ac.id/indonesia/main.php?hlm=berita&id=2005-03-03%2015:15:06). Diakses tanggal 20 Nopember 2008.
- Hogg A. M. (2003). *Social Psychology*, Volume IV. London : Sage Publications Ltd dalam Ichsan Malik, "Kontribusi Psikososial dalam Penanganan Konflik" pada <http://www.ui.ac.id/indonesia/main.php?hlm=berita&id=2005-03-03%2015:15:06>. Diakses tanggal 20 Nopember 2008.
- Hogg A. M. (2003). *Social Psychology*, Volume I. London : Sage Publications Ltd dalam Ichsan Malik, "Kontribusi Psikososial dalam Penanganan Konflik" pada <http://www.ui.ac.id/indonesia/main.php?hlm=berita&id=2005-03-03%2015:15:06>. Diakses tanggal 20 Nopember 2008.
- Syafarudin. Faktor Etnis dan Pergeseran Perilaku Pemilih (Dalam Lampung Post, Senin s10 Maret 2008). Diakases dari <http://www.lampungpost.com/cetak/cetak.php?id=2008031003103837> pada hari Jum'at 2 Januari 2009.
- Saurip Kadi. Islah dan Peran Elite dalam Perubahan Sosial (artikel Kompas, 1 Nov 2001). Diakses dari http://www.unisosdem.org/article_printfriendly.php?aid=120&coid=3&caid=31 Pada hari Jum'at 2 Januari 2009.
- Stanley, "Menuju Indonesia Baru" dalam [http://www.perki.info/html/ koinonia 1.htm](http://www.perki.info/html/koinonia_1.htm), diakses tanggal 20 Nopember 2008

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Responden :

Tokoh Etnis :

Tanggal Waktu :

1. Dalam pemilihan walikota pontianak, siapa yang Bapak pilih ?
2. Atas dasar apa bapak memilih calon walikota tersebut ?
3. Apakah bapak pernah menyarankan untuk memilih calon walikota tertentu ?
4. Apakah aspek etnis menjadi pertimbangan ?
5. Apakah aspek agama juga menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan ?
6. Bagaimana sikap anda terhadap hasil pemilihan ?
7. Bagaimana sikap anda terhadap isu – isu etnis dalam kampanye?

IM

Tokoh Masyarakat Melayu

20 / 11/2008

- T : Pertimbangan datok dalam memilih kepala daerah?
- J : Pertimbangan pertama : Figur (penampilan atau kesempurnaan fisik atau prototype dia sebagai seorang manusia)
Kemudian pertimbangan darui pada kepemilikan ilmu dan wawasan, setidaknya ada 6 wawasan yang harus dimiliki.
1. Wawasan Politik
 2. Wawasan Ekonomi
 3. Wawasan Birokrasi
 4. Wawasan Agama
 5. Wawasan Budaya
 6. Wawasan Hukum
- T : Pernah diminta pendapat tentang calon walikota ndak tok?
- J : itu tidak pernah, yang pernah saya malah diminta untuk menjadi calon atau saya ikut mendukung yang bersangkutan, tapi saya tolak! Karena ada pertimbangan-pertimbangan lain.
- T : Mungkin kalau keluarga, kerabat mengenai siapa-siapa yang harus dipilih?
- J : Aaa.. itu ada, Tetapi saya hanya menyarankan bahwa kalian memilih itu harus sesuai dengan hati nurani masing-masing. Kalau dalam hati nurani sudah ada pilihan, saya tidak ingin mencampuri, tidak etis itu...
Dalam pemilihan Walikota ini, saya hanya menegaskan, jangan pernah melupakan History nya kota Pontianak. Dari sejak zaman orde lama sampai orde baru dan sampai sekarang tidak pernah ada yang namanya Walikota Pontianak itu yang non Islam, dan pendiri kota Pontianak adalah mayoritas Islam.
- T : Jadi faktor etnis apakah menjadi pertimbangan tok?
- J : itu tidak selalu saya ungkapkan bahwa faktor etnis menjadi pertimbangan. Dan untuk kedepan saya juga pernah menyampaikan bahwa nuansa etnis dan agama tidak boleh dimunculkan dalam menampilkan figur-figur calon kepala daerah.
- T : Pandangan datok terhadap ada kandidat yang membawa-bawa isu etnis dalam kampanye?
- J : Itu sudah tidak profesional dan tidak etis. Tetapi *Alhamdulillah* dalam pemilihan Walikota kemarin itu tidak kita dengar, walaupun ada itu hanya bisik-bisik saja, dan secara terang-terangan kan tidak ada. Dan ke depan kita tidak menghendaki lagi adanya hal semacam itu.
- T : Dalam pemilihan Walikota Kemarin apakah ada pengaruh faktor etnis?
- J : Terpilihnya Sutarmidji kemarin menurut saya bukan karena faktor etnis/agama, akan tetapi seperti yang tadi sudah saya ungkapkan karena faktor penampilan diri seseorang yang sudah memasyarakat, karena sudah jauh-jauh hari ia mempromosikan dirinya kepada masyarakat.
- T : Kira-kira tok dari ke 7 kandidat siapa yang paling ideal, paling dianggap mampu dan memenuhi kriteria-kriteria?
- J : kalau saya melihat ya... memang yang terpilih sekarang ini lah .

Z A

Tokoh Masyarakat Melayu (Sek. Dewan Pemangku Adat)
03/12/2008

T : Bagaimana menyikapi isu-isu etnis dalam kampanye dan dalam ruang lingkup demokrasi?

J : adalah sesuatu yang wajar, karena bangsa Indonesia ini bersuku-suku. Khususnya kota Pontianak ada empat suku besar, pertama melayu, cina dan juga dayak. Dan tampaknya akhir-akhir ini hampir di seluruh daerah menjadi isu dalam rangka pemilihan kepala daerah.

T : Bagaimana dengan agama?

J : Aspek Agama sangat menentukan dalam kepemimpinan, pemimpin itu ditentukan oleh siapa yang mayoritas, itu tidak bisa tidak.

T : Apakah etnis atau suku juga menjadi pertimbangan?

J : Kalau suku sih ndak usah terlalu dipertimbangkan, suku apa saja boleh, karena suku tidak terlalu dominan, yang dominan adalah agama. Tapi untuk daerah Kal-Bar tampaknya masih penting. Walaupun sebenarnya dalam PILKADA itu tidak terlalu penting akan tetapi kalau sekarang sistemnya sudah demikian ya... mau ndak mau kita harus jalankan juga sistem apa namanya... Melayu - Dayak - Cina (MDC) atau DCM (Dayak - Cina - Melayu).

T : Pernah diminta pendapat ndak tok untuk memilih calon?

J : Calon Melayu terlalu dominan sehingga terpecah. Apalagi mengingat jumlah orang cina sudah mencapai 30%, jadi sebenarnya calon melayu paling banyak 3 orang saja. Supaya melayu tidak terpecah. Mengenai pendapat, banyak sekali pendapat, akan tetapi orang melayu ini susah diatur, mungkin karena semua udah merasa orang favorit semua.

T : Apa yang menjadi pertimbangan datok dalam memilih Walikota siapa yang datok pilih?

J : Saya memilih SUTARMIDJI. Pertimbangan saya pertama dia sudah pernah menjadi wakil walikota dan yang ke-2, diantara yang paling jelek mungkin dia sedikit jeleknya. Karena menurut saya tidak ada pemimpin yang ebetul-betul jujur, saya juga pengen pembangunan dapat terus berjalan.

T : Kriteria Pemimpin menurut datok?

J :
1. Taat Beragama
2. Amanah
3. Pendidikan Minimal S1 saya rasa itu sudah memadai.

T : Bagaimana kalau cina yang dominan tok?

J : Sistem POLITIK nya harus dipecah dari dalam, begitu sistem politik, paham kan?

T : Jadi, apakah isu etnis ini menurut datok efektif?

J : Saya kira tidak efektif, karena sekarang rakyat memilih figur. Figur yang Kharismatik.

A

H

**Tokoh Muda Masyarakat Melayu
25 /11 12008**

T : Pandangan abang terhadap hasil pemilihan walikota, apakah ada faktor etnisitas?

J : Kalau saya melihat sepertinya ada pengaruh etnisitasnya, apalagi di daerah kita ini kan pendidikan politik bagi masyarakat itu jarang sekali, hal itu bisa menyebabkan faktor primordial menjadi sangat tinggi sekali.

T : **Sikap abang terhadap isu etnis dan agama dalam PILKADA/PILWAKO?**

J : **Sangat menyayangkan hal tersebut.** Karena akan ada kepentingan sedangkan dalam memimpikan itu kan tidak memandang dari suku apa atau etnis apa. Itu semua bisa menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pembangunan.

T : Pernah ndak bang diminta saran kalau memilih pemimpin itu seperti apa, kriteria dan pertimbangan-pertimbangan lainnya?

J : Pernah, tapi saya sih hanya mengatakan **pilihlah sesuai dengan hati nurani.** Tetapi dalam hal ini bukan masalah hati nurani saja, masalah kinerja dan moral juga perlu dipertimbangkan. Saya juga pernah menyarankan janganlah kita memilih berdasarkan suku, Ras, dan agama. Justru dengan begitu untuk mengubah paradigma masyarakat. Akan tetapi itu tidak bisa spontanitas kita ngomong saja, realita dilapangan masyarakat masih beranggapan bahwa si A pernah menjadi ini, pernah menjabat itu, dan tidak berdasarkan analisa program apa yang ditawarkan dan realita di lapangan seperti apa.

T : Jadi pandangan agama ndak ye bang?

J : kalau saya pribadi tidak. Yang penting bagaimana dia mampu membawa kota Pontianak ini setidaknya-tidaknya berkurang masalahnya, masalah birokrasi, masalah masyarakat dan sebagainya.

T : Dari 7 calon yang paling ideal menurut abang dari segala kelebihan dan kekurangannya lah... siapa kira-kira bang?

J : Kalau saya melihat dari Visi dan Misi nya itu **Abduh dan Haitami.** Saya melihat masih rasional lah Visi dan Misi nya, walaupun saya nilai masih ada yang mengambang.

MI

Tokoh Masyarakat Jawa

20/11/2008

- T : Tanggapan abang terhadap isu-isu etnis dalam PILWAKO kemarin? Kalau kita lihat kan beberapa kandidat terdiri dari etnis yang beragam, ada etnis cina melayu, jawa, madura yang menjadi wakil dsb. Bagaimana pandangan abang?
- J : Kalau pendapat saya... Pertama ada pengaruh signifikan untuk beberapa etnik terhadap pilihannya. Pilihan memang dari hati nurani, Cuma permasalahannya berkaitan itu berkaitan dengan etnik tentu itu juga punya pengaruh yang kuat. Misalnya untuk masyarakat madura, tingkat ketokohnya sangat tinggi. Kemudian kedua, untuk masyarakat cina mungkin pada PILWAKO kemarin suara komunitas Tionghoa terbelah menjadi tiga, pada hal menurut saya cina itu cukup kuat dengan ketokohnya. Nah... masyarakat yang tingkat ketokohnya tidak terlalu dominan itu ada pada masyarakat Melayu dan Jawa. Jadi tidak terlalu signifikan pengaruh dari tokoh itu dibandingkan dengan masyarakat Madura dan Cina. Pada masyarakat Jawa dan Melayu itu cenderung cair dan sangat-sangat terbuka, jadi memang masyarakat Jawa dan Melayu itu kan bisa diterima dimana-mana.
- T : Pandangan abang terhadap beredarnya selebaran-selebaran, himbauan mendukung salah satu kandidat dengan mengatasnamakan etnis dan agama, kemudian isu-isu serta sms-sms gelap... itu bagaimana bang?
- J : Saya memang melihat lembaga-lembaga adat seperti jawa dan melayu memang cenderung cair, tetapi ada beberapa kekhawatiran ketika mereka ingin berpihak, misalnya ketika akan mendukung salah satu calon dan ternyata yang di dukung kalah, maka mereka akan pada posisi yang tidak mampu untuk berbuat, bahasanya mereka tidak lagi mempunyai catelan. Dan kalau pun para tokoh tersebut ingin berperan, mereka masih takut-takut mendukung secara terang-terangan, walaupun sebenarnya itu juga akan merugikan pada kelompok-kelompok masyarakat arus bawah. Pemimpin yang memberi dukungan di satu sisi masyarakatnya juga pasti akan memberikan dukungan-dukungan dengan yang lain, sehingga pada akhirnya akan terjadi perlawanan-perlawanan. Memang harapan kedepan, lembaga-lembaga adat semacam ini bisa lebih mandiri, sehingga masyarakat yang diayominya pun akan mandiri juga dalam memilih.
- T : Bukankah dalam politik, unsur-unsur etnis ini tidak bisa dihindari bang, sejauh mana toleransinya?
- J : Betul, akan tetapi setidaknya masyarakat harus diberi pemahaman mana agama, mana politik, permasalahannya adalah dalam menentukan seseorang pemimpin bukan dari faktor agama saja, tetapi banyak faktor-faktor yang lainnya yang dijadikan sebagai pertimbangan.
- T : Kriteria pemimpin menurut abang, apa kira-kira bang?
- J : Pertama, dia memiliki kapasitas keimanan. Kedua, dia memiliki kapasitas keilmuan dan ketiga dia cukup membumi, bahasa membumi adalah ia dekat dengan rakyat, tidak hanya waktu kampanye, tetapi memang sebelumnya pun

K Y

Tokoh Masyarakat Jawa

20/11/2008

T : Sikap terhadap hasil pemilihan walikota? Apakah ada kaitannya dengan etnis?

J : Peran etnis cukup dominan dalam menentukan kemenangan pasangan SIIP.

T : Tetapi bukankah beberapa kandidat dari etnis Melayu terpecah?

J : Kedekatan kedua tokoh tersebut kepada masyarakat sebagai wakil walikota yang pro rakyat dan sebagai anggota DPRD.

T : Pandangan bapak terhadap isu etnis, seperti selebaran, sms gelap dan sebagainya?

J : Hal tersebut tidak bisa dibenarkan dan tidak mencerdaskan bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya.

T : Faktor Agama?

J : Isu agama cukup berperan (Melayu-Melayu)

T : Apa kriteria pemimpin menurut bapak?

J : - Visi dan Misi nya.
- Kepedulian terhadap persoalan-persoalan rakyat
- Religius dan Morality.

T : Pernah diminta saran / pendapat terhadap pasangan kandidat walikota?

J : Pernah, oleh salah satu tim agar komunitas jawa memilih dan menemui pasangan calon tersebut, akan tetapi itu tidak penting. Kita sebagai orang yang mengerti bahwa demokrasi harus dibangun dengan cara-cara yang lebih elegan dan objektif.

T : Signifikansi dukungan masyarakat Jawa terhadap salah satu calon (calon no 7) yang berasal dari etnis Jawa?

J : Tidak. Hal tersebut karena orang Jawa tidak menunjukkan ia sebagai orang Jawa.

T : Calon yang ideal menurut bapak?

J : Sutarmidji dan Gusti Hersan. Hal ini dilihat dari penyampaian Visi dan Misinya serta kemampuan beliau dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat penyampaian Visi dan Misi dan Debat Kandidat.

dia memang dekat dengan rakyat. Kemudian yang keempat bertanggung jawab dunia dan akhirat. Saya yakin jika ke empat kriteria ini dimiliki, pasti dia tidak akan korupsi dan melakukan hal-hal yang negatif.

T : Siapa menurut abang yang paling ideal?

J : Ya... Jujur ya... Saya hanya melihat kalau Saya lebih cenderung memilih Haitami. Saya kenal beliau, waktu Debat Kandidat juga beliau tampil sangat bagus. Dan saya saya ikuti sampai selesai waktu itu.

T : Apakah hasil pemilihan kemarin menurut abang terpilihnya pasangan SIIP disebabkan adanya kecenderungan etnis bang?

J : Saya melihat Sutamidji cukup strategis dalam mengambil langkah, ketika suara Melayu terpecah, Cina juga terpecah, maka beliau harus mencari suara yang tidak terpecah. Sebagaimana kita ketahui kota Pontianak ini kan terdiri dari dominasi Cina, Melayu dan Madura dan sebagian juga Jawa. Mungkin pertimbangan Sutarmidji memilih Paryadi, pertama dia memang orang Madura, kemudian yang kedua bapaknya merupakan orang yang berpengaruh dalam masyarakat Madura. Kemudian mungkin bukan dari faktor etnik, orang ini kan (Sutarmidji-ed) berjuang udah dari empat tahun yang lalu, dengan bantuan-bantuan berupa semen, pasir, pembangunan jalan-jalan, itu pengaruhnya luar biasa sekali. Dan dari figurnya juga kan beliau cukup dikenal dalam masyarakat.

T : Kalau suara masyarakat Jawa bang?

J : Jawa pecah... karena tidak ada tokoh jawa yang signifikan untuk dipilih.

T : Ibu ? (Sri Astuti-ed)

J : Ibu tidak masuk kategori untuk dipilih, beliau pun belum ditokohkan.

T : Pernah diminta saran ndak bang...? Keluarga, kerabat atau tetangga... tentang kira-kira siapa yang harus dipilih?

J : Pernah... kemarin bahkan ada tiga tim yang meminta saya, akan tetapi karena saya tidak memiliki kapasitas untuk memilih, jadi saya katakan lebih baik saya menonton dari luar saja.

T : Harapan terhadap masa depan politik dan demokrasi serta korelasinya terhadap kepentingan etnis?

J : Kita ini kan masyarakat pintar Cuma 10%. Dari sisi tingkat pendidikan SLTA ke atas cuma 10% dari jumlah penduduk kita. Masyarakat perlu diberikan pendidikan politik, bagi para pemimpin nya juga agar tidak memandang dari sisi etnik-etnik tertentu, ada etnik yang diprioritaskan atau politik injak bambu, ada yang diangkat kemudian ada pula yang diangkat. Itu semua tentu tidak kita harapkan...

H S

**Tokoh Masyarakat Jawa
20/11/2008**

- T : Partisipasi etnis jawa dalam PILWAKO sepertinya kurang, bagaimana menurut bapak?
- J : Kaya'nya belum, saya pribadi banyak partai yang melamar, cuman saya sendiri meyakini belum atau tidak mau atau memang tidak ada bakat kesana. Jawab saya... ya... belum siap dan ingin membenahi atau ingin mengembangkan usaha yang sudah dirintis sejak awal.
- T : Pandangan bapak terhadap proses PILWAKO serta kaitannya dengan politik etnis, sampai ada yang katanya Jawa harus dukung Jawa, Melayu dukung melayu, Cina akan mendukung Cina, itu bagaimana pak?
- J : Menurut saya nggak, nggak setuju saya. Kalau saya ya... cawako manapun yang menurut pribadi masing-masing layak untuk memimpin ya... itulah pilihannya. Kalau kita berpandang kepada suku, ya... kalau beliau mampu, kalo saya melihat nggak mampu nggak perlu didukung.
- T : Dalam masyarakat jawa apakah ada kriteria-kriteria atau syarat bagi seorang pemimpin?
- J : Menurut saya... ya... orang yang
1. Harus beragama Islam (dalam hati saya jika memilih non islam sama dengan munafik).
 2. Beliau mampu memimpin daerah ini
 3. Bisa mensejahterakan warganya.
- T : Terpilihnya Sutarmidji dan Paryadi karena perpaduan Melayu dan Madura, menurut pandangan bapak bagaimana?
- J : Nda'.... Bukan itu faktornya. Yang pertama adalah karena figurnya pak Tarmidji (Sutarmidji-ed). Karena beliau juga Wakil, pembangunan yang dilakukan banyak lewat beliau. Walaupun hanya lewat proposal pun melalui Pa' Sutarmidji.
- T : Pandangan bapak terhadap sms-sms yang menyebar menjelang pemilihan dengan membawa isu agama, bagaimana itu pak?
- J : Namanya selebaran... kalo kita yang islam harus memilih yang islam. Tapi itu kan hanya trik-trik aja.

SR

Tokoh Masyarakat Dayak
05/12/2008

T : Bagaimana tanggapan Bapak terhadap hasil PILWAKO dengan isu-isu etnis ?

J : Pertama-tama kami selaku Tumenggung adat dayak merasa senang terhadap hasil PILWAKO kemarin, karena etnis yang ada di kota Pontnianak ini bercampur baur, sepaham, sei-ya se-kata. Prinsip kita adalah MAU BERSATU.

Kami Tumenggung Adat Dayak ini Netral dan tidak berbau politik. Tumenggung Adat Dayak tidak mencampuri urusan Politik, dia khusus mengurus Hukum adat.

T : Pandangan Tumenggung dengan calon-calon yang mengaitkan dengan isu etnis dan agama bagaimana?

J : Kalau itu biasa saja, bahasanya orang yang mencari dukungan. Itu sama saja dengan MENGADU DOMBA.

Kalau kedengaran kami, maka kami akan segera menelusuri. Jadi kami akan menetralsir semua masalah, kami akan panggil!!! Agama ini – politik ini, itu tidak ada. Politik – politik, agama ya... agama. Agama itu jangan dicampur adukan dengan politik. Agama itu adalah kepercayaan, keyakinan kita masing-masing.

T : Berarti membawa-bawa isu etnis dalam politik tidak dibenarkan ya pak ?

J ; Ndak Boleh.... Berdosa, itu namanaya membuat sara, terpecah belah... Apa lagi kita ini kan dayak dengan melayu itu tidak begitu auh.

T : Sebagai Tumenggung, pasti pernah diminta saran mengenai kira-kira siapa yang harus dipilih, tanggapan bapak bagaimana?

J ; Kalau saya figur yang saya senang. Tidak saya mengaitkan harus begini... tidak pernah. Saya senang dengan anda pilih ya... pilih. Tidak ada kaitan dengan agama, suku. Karena dia orang Melayu, Dayak, Tionghoa... ndak ada. Initinya saya senang – saya senang. Tidak bisa dipaksakan.

T : Kriteria ideal seorang pemimpin menurut bapak?

J :
1. Mampu menyikapi, menimbang dan memutuskan.
2. Loyalitas
3. Pandai bermasyarakat – merakyat.
4. Tahu diri
5. PD (Percaya Diri)

T : Tapi bagaimana dengan keterlibatab perangkat-perangkat adat dalam persoalan politik dan mengarah kan untuk memilih Si-A atau Si-B?

J : Lembaga Adat Dayak ini kan Netral. Kalaupun ada itu individu, bukan membawa lembaga atau etnis. Berpolitik itu kan bebas, hak setiap orang, tetapi tidak boleh membawa nama etnis/lembaga adat.

EP

Tokoh Masyarakat Dayak

18/11/2008

- T : Tanggapan abang terhadap isu etnis dalam PILWAKO?
- J : Menurut saya pribadi isu etnis dalam PILWAKO serta persoalan-persoalan yang bernuansa etnis kaya'nya tidak terlalu menarik minat masa lagi. Terutama bagi masyarakat menengah ke atas, dan masyarakat saat ini lebih realistis dalam memilih saya kira kemenangan Sutarmidji bukan kerana semata-mata Sutarmidji orang Melayu dan Paryadi – Madura. Tetapi lebih pada Sutarmidji yang sedang menjabat Wakil Walikota dan beliau punya program bedah rumah untuk masyarakat miskin lebih 500.000 rumah, dan itu betul-betul terlaksana, seperti di daerah beting,, perbaiki pasar, perbaiki agrarian dsb. Jadi faktor etnis tidak terlalu dominan.
- T : Adanya sms-sms gelap, serta anjuran untuk memilih salah satu kandidat, kemudian selebaran-selebaran... apakah memiliki dampak yang signifikan dalam pemilihan?
- J : Sebenarnya belajar dari pengalaman pemilihan Gubernur dulu, justru isu-isu memojokkan kelompok tertentu kan malah menjadi sesuatu yang kontra produktif. Akan tetapi bagi masyarakat awam isu-isu ini masih ada, kalau mau memilih harus tau dulu dia orang apa, dari mana, suku apa.
- T : Kalau boleh tau, secara pribadi pertimbangan abang dalam memilih itu seperti apa?
- J : Kalau saya secara pribadi lebih kepada yang relatif bersih, lebih punya pengalaman lah... dalam pemerintahan, kemudian memiliki sesuatu yang berguna untuk masyarakat, artinya memiliki sesuatu yang nyata berguna untuk masyarakat lah.
- T : Sebagai tokoh muda, pernah nda' bang diminta pendapat oleh keluarga atau handai taulan mengenai kira-kira siapa yang harus dipilih, dan pertimbangan-pertimbangannya?
- J ; Sering... karena kita kan bergaul dengan berbagai kalangan. Saya selalau bilang itu tadi, kita ini mencari pemimpin yang bisa membawa kepada keadaan menjadi lebih baik, maka penting itu orang yang jujur, bersih, kemampuan manajerial, akan tetapi saya tidak pernah menyebut namanya.
- T : Ada yang mengatakan Sutarmidji menang karena wakilnya madura dan suara madura tidak terpecah, bagaimana itu bang?
- J : Menurut pengamatan saya pa' Sutarmidji menang pertama dia punya pengalaman. Kemudian dia punya program yang sudah berjalan dan bagaimanapun mesin politiknya kan bekerja. Seperti PPP, suaranya kan lumayan juga. Mungkin strategi kampanye nya juga menarik. Saya tau, seperti di ujung jalan sana (Jl.28 Oktober-ed) setau saya hanya pa' Sutarmidji yang pernah kesana, mungkin itu gambaran bahwa beliau rajin keliling. Pendekatannya dengan masjid-masjid, rajin datang ke Mesjid-mesjid untuk shalat jum'at dan faktor Paryadi juga ada pengaruhnya. Setau saya Paryadi ini kan berasal dari orang Madura yang relatif terpendang, dan saya dengar juga bapaknya sebagai tokoh masyarakat Madura.

IA

Tokoh Masyarakat Arab

03/12/2008

T : Bagaimana menurut bapak terhadap hasil pemilihan walikota Pontianak tempo hari jika dikaitkan dengan isu-isu etnis, selebaran-selebaran dan sms yang beredar?

J : sebenarnya hal-hal semacam itu tidak dapat dibenarkan, karena bisa memicu terjadinya konflik antar etnis dan golongan hanya gara-gara keperningan-keperntingan dari sebgaiian orang. Meskipun pada kenyataannya hal semacam itu dianggap wajar dalam dunia politik. Tetapi masyarakat kota Pontianak sudah cukup cerdas dalam menentukan pilihannya. Bahkan kota Pontianak bisa dijadikan percontohan bagi daerah lainnya. Masyarakatnya terdiri dari berbagai suku dan etnis, tetapi beberapa kali pemilihan dari pemilihan Gubernur sampai pemilihan Walikota tetap aman-aman saja.

T : Kalau diminta saran atau pendapat untuk memilih calon Walikota, pernah ndak pak?

J : Ada juga yang pernah meminta pendapat, tetapi saya serahkan sepenuhnya kepada masing-masing individu untuk memilih siapa.

T : Kira-kira apa yang menjadi pertimbangan atau kriteria-kriteria menurut bapak?

J : Kepedulianya kepada masyarakat, wawasan, yang jelas dapat menjadikan kota Pontianak menjadi lebih baik.

Sampai disini saja wawancaranya, karena Pak Ishak buru-buru mo' pegi to ngisi pegajiannya.

AD

Tokoh Masyarakat Arab

0/12/2008

T : Sikap bapak terhadap isu-isu etnis dalam kampanye bagaimana pak?

J : Tidak Setuju. Karena dapat memicu kembali terjadinya konflik di kota Pontianak, apa lagi di daerah ini (Kampung Arab-ed) masyarakatnya terdiri dari etnis Melayu, Arab, Madura, Jawa, Bugis dsb.

T : Apakah bapak pernah diminta menyarankan / diminta untuk memilih calon walikota tertentu?

J : Tidak pernah. Kami menyerahkan pilihan sepenuhnya sesuai dengan hati nurani masing-masing.

T : Tapi bukankah Kota Pontianak didirikan Sultan,,, orang Arab pak?

J : oOo... tidak masalah, yang penting bisa memberikan perubahan dan menjadi lebih baik.

T : Bagaimana dengan agama pak, apakah menjadi pertimbangan?

J : Tidak. Buktinya di daerah ini perolehan suaranya bermacam-macam.

T : Apakah walikota yang terpilih ini sudah layak menurut bapak?

J : Ya... sudah cukup layak lah, beliau kan juga sudah cukup berpengalaman dan dekat dengan masyarakat.

SS

Tokoh Muda Masyarakat Arab
02/12/2008

T : Bagaimana menurut abang mengenai isu-isu etnis dalam kampanye pemilihan Walikota yang telah dilangsungkan tempo hari?

J : Hal tersebut tidak bisa dibenarkan, karena hanya akan merusak kekeluargaan dan kebersamaan umat Islam. Biarlah rakyat yang memilih, seleksi alam akan menunjukkan yang terbaik pasti akan muncul.

T : Bagaimana dengan agama?

J : Kita ingin mengetahui terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan Hukum Allah atau Hukum Tata Negara? Jika kita berbicara hukum Allah (agama-ed) maka sudah jelas standarnya adalah iman. Akan tetapi jika hukum negara, standarnya adalah hanya akal manusia, hukum yang di buat oleh manusia berdasarkan akal dan fikiran manusia.

T : Pernah ndak bang diminta saran / pendapat oleh keluarga, teman atau handai taulan mengenai salah satu kandidat Walikota kemarin?

J : Pernah... ada memang beberapa dari tim sukses yang datang dan meminta kita mendukungnya. Tapi kita dari awal sudah kommitment untuk tetap bersikap independent!!!

T : Mungkin ada pertimbangan lain? Kemampuan memimpin, Wawasan, pengalaman atau apa lah menurut abang...

J : Oh... itu pasti... hal-hal semacam itulah yang seharusnya menjadi pertimbangan, masyarakat seharusnya mendapatkan pendidikan politik agar tidak salah dalam menentukan pilihannya.

T : Menurut abang apakah terpilihnya pasangan Sutarmidji dan Paryadi ada kaitannya dengan isu-isu etnis?

J : Tidak juga, saya menilai memang sudah jauh-jauh hari mempersiapkan diri untuk memimpin kota Pontianak ini, beliau juga cukup dekat dengan masyarakat.

T : Kira-kira menurut abang apakah beliau sudah layak untuk memimpin kota Pontianak bang?

J : Ya... beliau memang layak, tetapi kita sebagai masyarakat akan tetap menilai kinerja-kinerja beliau, selama pada jalur yang benar akan tetap kita dukung, akan tetapi jika mulai melenceng, kita tidak akan tinggal diam, apa pun resikonya.

Nama : FT
Umur : 26 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Tokoh Etnis : Madura
Tgl/Waktu : 20/13.34

Jawaban

1. Pasangan SIIP
2. Yang menjadi pertimbangan saya adalah mereka masing-masing sudah mempunyai besik & dan masing-masing juga sudah mewakili dari kaum orang tua dan kaum muda.
3. Iya. mereka masing-masing sudah berpengalaman, terutama Pa' Sutarmiji yang sudah menjabat di wakil wali kota kemaren.
4. Wajib. karena etnis itu yang saya rasakan juga. memang selama ini madura seakan-akan tidak ada, dan mereka khususnya Madura pasti melihat figur
5. Menurut saya tidak jadi masalah, siapa yang memimpin. kalau menurut saya apa pun agamanya kalau sesuai, seimbang, harus di dukung
6. Senang, jagoan saya menang, aman lagi.
7. Tidak menjadi masalah juga, karena menurut saya orang di kota itu mulai sadar dan cerdas, jadi tidak terpengaruh dengan isu seperti itu, beda dengan di kampug yang rentan dengan kondisi seperti itu.

Nama : SH
Umur : 34 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki Tokoh Etnis Madura
Tgl/Waktu : 22/09.30

1. Pasangan SIIP
2. Kawan, sama Madura
3. Wajib. Karena saya juga salah satu TIM suksesnya dia. mari kata bersama ikut serta dalam politik ini dan mendukung Paryadi, karena sekarang kesempatan kita.
4. Jelas, karena dengan suara Etnisitas itu masyarakat menjadi semangat
5. Agama juga ada, tapi kalau dibandingkan dengan etnis lebih kuat. karena kalau agama itu bisa dikatakan umum. tapi kalau etnis tidak bisa
6. Senang
7. Saya pikir kalau di dalam suatu kampanye itu, membawa isu-isu etnis itu alami jadi biasa-biasa saja. karena siapa pun itu di Kal-Bar ini pasti bermain itu.

Nama : FA
Umur : 35 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan Tokoh Etnis Madura
Tgl/Waktu : 22/17.30

Jawaban

1. Pasangan SIIP
2. Karena ada rasa solidaritas, sama-sama Madura, dan masih muda lagi.
3. Secara umum saya menyarankan kepada siapa saja. Tapi, saya fokuskan kepada orang-orang Madura. isi saran tersebut kita semua orang madura harus bersatu, karena selama ini kita termarginalkan. Jadi kesempatan kita sekarang untuk maju
4. Aspek etnis memang menjadi suatu pertimbangan, tapi kita sebagai etnis madura akan mendukung siapa saja dalam pilwako kemarin, siapa pun dia yang penting Madura.
5. Faktor utama itu, yang pasti madura itu tentang dengan Agamanya. oleh karena itu agama juga menjadi pertimbangan.
6. Sedang-sedang saja
7. Tidak begitu menanggapi. Karena kita bergerak pada waktu itu tidak terang-terangan.

Nama : NA
Umur : 39 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tokoh Etnis : Madura
Tgl/Waktu : 19/16.50

JAWABAN

1. Yang saya dukung adalah bapak Gusti Hersan
2. Yang menjadi Pertimbangan saya, karena saya sudah kenal calon mengetahui tentang dia, dan yang paling pas menurut saya. karena dia sudah menjadi salah satu anggota DPR. artinya dia juga sudah tau dengan kondisi masyarakat.
3. Saya tidak memberi pandangan kepada siapapun. Tapi, apabila kita sudah berkumpul, kadang-kadang juga saya hanya member pandangan kepada mereka siapa yang layak untuk dipilih.
4. Kalau saya pribadi tidak ada pertimbangan etnis. Kerena kalau saya memakai pertimbangan itu otomatis saya tida mendukung Bapak Hersan, melainkan mendukung pasangan nomor empat (Sutarmiji dan Peryadi).
5. Yeee bagi saya itu wajar-wajar saja, karena di dalam pemilihan itu tidak memandang agama apa pun, yang penting adil, dan tahu apa yang harus dilakukan untuk kedepanya.
6. Harus diterima, itukan sudah demukrasi
7. itu si.... biasa di dalam kepentingan Politik, makanya sebagain masyarakat menyebutkan politik itu kotor. karena Agama, Etnis itu cenderung kepada kerusuhan, dan ini yang disebut dengan penyakit politik

HASIL WAWANCARA

Nama responder : PH
Tokoh etnis : Tionghoa
Tanggal/waktu : 23-11-2008

Tanya: Dalam pemilihan walikota, siapa yang anda pilih?

Jawab: Wah, tidak enaklah kalau kasi tabu...

Tanya: Atas dasar apa Anda memilih calon walikota?

Jawab: Karena dia memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin

Tanya: Apakah anda pernah menyarankan memilih calon walikota tertentu?

Jawab: Tidak pernah

Tanya: Apakah aspek etnis menjadi salah satu pertimbangan anda?

Jawab: Tidak, kerana kita semua adalah satu

Tanya: Apakah aspek agama juga menjadi pertimbangan anda?

Jawab: Tidak, kerana pada dasarnya semua agama itu sama

Tanya: Bagaimana sikap anda terhadap hasil pemilihan walikota?

Jawab: Puas, kerana itu berdasarkan pilihan orang banyak

Tanya: Bagaimana sikap anda terhadap isu-isu etnis dalam kampanye?

Jawab: Biasa saja, kerana etnis manapun yang memimpin sama saja asal memenuhi kriteria menjadi seorang pemimpin

Nama responder : MN
Tokoh etnis : Tionghoa
Tanggal/waktu : 21-11-2008

Tanya: Dalam pemilihan walikota, siapa yang anda pilih?
Jawab: tentu yang bagus

Tanya: Atas dasar apa Anda memilih calon walikota?
Jawab: persamaan etnik

Tanya: Apakah anda pernah menyarankan memilih calon walikota tertentu?
Jawab: pernah

Tanya: Apakah aspek etnis menjadi salah sate pertimbangan anda?
Jawab: iya

Tanya: Apakah aspek agama juga menjadi pertimbangan anda?
Jawab: iya

Tanya: Bagaimana, sikap anda terhadap hasil pemilihan walikota?
Jawab: cukup menerima

Tanya: Bagaimana sikap anda terhadap isu-isu etnis dalam kampanye?
Jawab: hukum akan bertindak jadi tidak perlu dirisaukan

Nama responder : SF
Tokoh etnis : Tionghoa
Tanggal/waktu : 23-11-2008

Tanya: Dalam pemilihan walikota, siapa yang anda pilih?
Jawab: yang sesuai hati nurani

Tanya: Atas dasar apa Anda memilih calon walikota?
Jawab: persamaan Etnis

Tanya: Apakah anda pernah menyarankan memilih calon walikota. tertentu?
Jawab: pernah

Tanya: Apakah aspek etnis menjadi salah satu pertimbangan anda?
Jawab: iya

Tanya: Apakah aspek agama juga menjadi pertimbangan anda?
Jawab: iya

Tanya: Bagaimana sikap anda terhadap hasil pemilihan walikota?
Jawab: menerima apa adanya

Tanya: Bagaimana sikap anda, terhadap isu-isu etnis dalam kampanye?
Jawab: tidak masalah itu hanya, sebuah isu

Nama responder : AK
Tokoh etnis : Tionghoa
Tanggal/waktu : 22-11-2008

Tanya: Dalam pemilihan walikota, siapa yang anda pilih?

Jawab: wah, saya tak bisa jawab yang ini ya...

Tanya: Atas dasar apa Anda memilih calon walikota?

Jawab: atas dasar suka karena mempunyai kinerja yang baik ... atas dasar kenal, sudah mengenal baik calon walikota tersebut..

Tanya: Apakah anda pernah menyarankan memilih calon walikota tertentu?

Jawab: pernah, karena bisa saja seseorang dari calon tersebut merupakan teman, atau mungkin kerabat kits

Tanya: Apakah aspek etnis menjadi salah sate pertimbangan anda?

Jawab: tidak, karena menurut saya etnis apa saja pantas, asalkan orang tersebut punya kernampuan untuk menjadi pemimpin maka ia layak

Tanya: Apakah aspek agamajuga menjadi pertimbangan anda?

Jawab: tidak karena menurut saya jika seorang telah siap ingin menjadi pemimpin maka ia akan mempunyai rasa toleransi beragama yang tinggi dalam menjalankan tugasnya

Tanya: Bagaimana, sikap anda terhadap hasil pemilihan walikota?

Jawab: sebagai warga yang baik tentu harus bersikap yang baik, menerima dengan lapang dada.

Tanya: Bagaimana, sikap anda terhadap isu-isu etnis dalam kampanye?

Jawab: bersikap netral saja, tidak usah ditanggapi dan menanggapi karena hal itu sekedar berita yang dibuat-buat oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang mempunyai motif tidak jelas yang hanya ingin memprovokasi orang-orang.

Nama responder : AL

Tokoh etnis : Tionghoa

Tanggal/waktu : 23-11-2008

Tanya: Dalam pemilihan walikota, siapa, yang anda. pilih?
Jawab: jangan tanya yang ini... rahasia...

Tanya: Atas dasar apa Anda memilih calon walikota?
Jawab: dasarnya setiap kota harus ada, pemimpin kota

Tanya: Apakah anda pernah menyarankan memilih calon walikota tertentu?
Jawab: tidak

Tanya: Apakah aspek etnis menjadi salah satu pertimbangan anda?
Jawab: tidak, semua suku boleh jadi pemimpin

Tanya: Apakah aspek agama juga menjadi pertimbangan anda?
Jawab: tidak, semua suku atau penganut agama boleh

Tanya: Bagaimana sikap anda terhadap hasil pemilihan walikota?
Jawab: sangat baik dan netral

Tanya: Bagaimana sikap anda terhadap isu-isu etnis dalam kampanye?
Jawab: sangat baik, hati terbuka, berjiwa besar

Lampiran

PROGRAM-PROGRAM UNGGULAN CALON WALIKOTA PONTIANAK



Drs. H. MOH. HAITAMI SALIM, M.Ag. - H. GUSTI HARDIANSYAH, M.Sc. QAM
[HADE]

10 Program Unggulan

1. Penataan dan penyediaan lokasi khusus untuk pembuangan sampah agar kebersihan dan kenyamanan kota tetap terjaga.
2. Perbaikan sarana penyaluran air guna mengatasi banjir.
3. Peningkatan jumlah fasilitas dan daya guna peralatan pembangkit tenaga listrik.
4. Peningkatan jumlah fasilitas dan daya guna peralatan pengadaan air bersih.
5. Sekolah gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu.
6. Pemberian beasiswa kepada siswa dan mahasiswa berprestasi.
7. Pemberian kesempatan dan bantuan kepada guru untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
8. Penataan dan penyediaan lokasi usaha bagi pengusaha kerajinan daerah.
9. Memaksimalkan peran tokoh agama dalam membina moral dan etika masyarakat.
10. Permudah layanan bagi masyarakat dengan birokrasi yang bersih.



**Drg. H. OSCAR PRIMADI, MPH - Drs. HARTONO AZAS, L.MBA
[OBAMA]**

10 Program Unggulan

1. Membangun Kesejahteraan Ekonomi Kerakyatan Secara Merata Di Setiap Kecamatan.
2. Membangun Rasa Aman Dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Lingkungan Hidup.
3. Melakukan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Warga Kota Pontianak.
4. Membangun Daya Saing Hidup Dan Kesehatan Bagi Seluruh Warga Kota Pontianak.
5. Terciptanya Profesionalisme Birokrasi.
6. Membangun Strategi Promisi Bagi Karakter Kota Pontianak Pada Bidang Pariwisata.
7. Membangun Infrastruktur Yang Memadai Secara Merata Di Setiap Kecamatan.
8. Terevitalisasinya Potensi Ekonomi Sungai Kapuas.
9. Membangun Kualitas Dan Derajat Hidup Kesehatan Warga Kota Pontianak.
10. Membangun Dan Menata Ruang Publik Yang Berkualitas Dan Tertata.



MUHAMMAD ABDUH, In H. - MUHAMMAD TAHA, SH
[DUTA]

Program Unggulan :

1. Memper uangkan APED untuk Rakyat Mulai Tahun 2009 Meliputi
2. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Produktif dan Bertanggung jawab
3. Pendidikan yang Ter angkau dan Berkualitas
4. Penyediaan Lapangan Keda dan Pemberdayaan UMKM
5. Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah
6. Membangun Kota yang Bersih, Sehat dan Berwawasan Lingkungan
7. Membangun Kepedulian Social, Budaza, dan Keagamaan
8. Mewujukan Suasana yang Aman, Tentram dan Nyaman Bagi Seluruh

Masyarakat Kota Pontianak



4

**H. SUTARMIDA, SH, M.Hum - PARYADI, S. Hut
[SIIP]**

Program Unggulan

1. PENINGKATAN KUALITAS DAN PELEBARAN JALAN UTAMA DI KOTA PONTIANAK MAKSIMAL MENJADI 10 — 12 METER DAN PENATAAN ULANG DRAINASE KOTA.
2. PENUNTASAN PERBAIKAN JALAN LINGKUNGAN / GANG.
3. PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNT ANTARA 500 — 1000 RUMAH / TAHUN.
4. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.
5. TRANSPARANSI MANAGEMENT APED.
6. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DENGAN TARGET ANGKA KELULUSAN SISWA DIATAS 95 %.
7. PEMBANGUNAN GEDUNG SMP DAN SMU SERTA SMK BARU UNTUK MEWUJUDKAN PENDIDIKAN MURAH, BERKUALITAS DAN MERATA.
8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN MEMBEBAKSIKAN BIAYA BEROBAT DI PUSKESMAS.
9. PEMBERDAYAAN RT, RW DAN LPM DENGAN MENGEMBALIKAN PENDAPATAN DART PBB (PAJAK BUMI DAN BANGUNAN) SEKTOR PERKOTAAN SEBAGAI DANA OPERASIONAL RT, RW DAN LPM.
10. MENUMBUH KEMBANGKAN NILAI-NILAI BUDAYA SEBAGAI PENUNJANG PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KOTA PONTIANAK.



HARSO UTOMO SUWITO - H. AWALUDIN RAHMAD
[HARKAD]

PROGRAM UNGGULAN

1. PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
2. PENATAAN PERPARKIRAN
3. PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT TENTANG AIR BERSIH DAN SEHAT MELALUI PENGELOLAAN — (PDAM) DENGAN BENAR.
4. PEMENUHAN KEBUTUHAN LISTRIK MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DENGAN PLN (Pemsahaan Listrik Negara).
5. PELAYANAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DENGAN PROSEDUR DAN PROSES YANG SANGAT MUDAH TANPA HARUS MEMBAYAR (GRATIS) DENGAN WAKTU SINGKAT.
6. PEBAIKAN JALAN LINGKUNGAN DENGAN SISTEM KESWADAYAAN (GOTONG ROYONG) MASYARAKAT DIDUKUNG DENGAN DANA PEMERINTAH.
7. PEMBERIAN FASILITAS KEMUDAHAN MEMPEROLEH RUMAH UNTUK KALANGAN LANSIA YANG BELUM PUNYA RUMAH.
8. MENINGKATKAN INVESTASI SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA UNTUK MEMACU DAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS MASYARAKAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP.
9. PEMELIHARAAN JALAN, SALURAN DAN SAMPAH YANG DISERAHKAN PELAKSANAANNYA KEPADA RW / RT SETEMPAT SEHINGGA LEBIH EFEKTIF DAN EFFISIEN.
10. TRANSPARANSI PUBLIK (KE TERBUKAAN TERHADAP MASYARAKAT) ATAS ANGGARAN BELANJA DAERAH, BAIK SEBELUM DISYAHKAN MAUPUN SETELAH DISYAHKAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PONTIANAK.



6

H. GUSTI HERSAN ASLI ROSA, SE. - SETIAWAN LIM, SH.

[GHESIT]

Program Unggulan

1. Melakukan modernisasi pengelolaan pemerintahan menuju penyelenggaraan pemerintah yang bersih dengan pelayanan publik yang prima. **Program Prioritas** : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang administrasi, informasi, pajak, pendidikan dan kesehatan minimal 2 kali lebih baik, meningkatkan kesejahteraan PNS, bonus bagi PNS berprestasi, penyelenggaraan 5 hari kerja.
2. Mengembangkan perekonomian rakyat yang tangguh dan melakukan perluasan kesempatan usaha bagi masyarakat. **Program Prioritas** : Mendorong terciptanya lokasi-lokasi usaha / perdagangan bare bagi masyarakat, membangun bussiness center sebagai kantor bersama bagi pengusaha pemula.
3. Mengembangkan iklim bisnis dan investasi yang kondusif dan berdaya saing **Program Prioritas** : Membangun sistem pelayanan bisnis dan investasi yang efektif dan efisien.
5. Mengembangkan sistem pendidikan yang bermutu dan mencerdaskan. **Program Prioritas** : Pendidikan gratis 12 tahun, menekan angka putus sekolah, beasiswa bagi masyarakat tidak mampu, penmgkatan kesejahteraan guru, bonus bagi pelajar berprestasi.
6. Memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. **Program Prioritas** : Jaminan perawatan dan pengobatan gratis bagi warga miskin, meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas.

7. Mengembangkan lingkungan sosial budaya yang aman dan harmonis. **Program Prioritas** : Membangun kebersamaan dalam perbedaan dan toleransi antar umat beragama.
8. Mengembangkan infrastruktur kota yang merata, akseleratif dan pro lingkungan hidup. **Program Prioritas** : Pembangunan jalan lingkungan melalui program pembangunan 1000 gang, pembangunan saluran air, pembangunan jalan lingkar, Berta peningkatan akses air bersih untuk rakyat hingga ke pelosok daerah.
9. Mengupayakan pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang fokus dan terintegrasi. **Program Prioritas** : Membuka lapangan usaha bagi pengusaha bare, memberikan bantuan modal bagi pengusaha kecil, mengembangkan kurikulum berbasis kewirausahaan di SMK-SMK.
10. Meningkatkan peran perempuan dan pemuda dalam segala aspek **Program Prioritas** : Peningkatan peran perempuan yang lebih lu²s dalam bidang pemerintahan, serta pelibatan pemuda dalam akselerasi pembangunan kota.



Dra. Hj. SRI ASTUTI BUCHARI, M.Si - H. EKA KURNIAWAN, SE, MM
[SetiaKawan]

Program Unggulan

1. Kebijakan dan Program Pendidikan

- Program Wajib Belajar 12 Tahun
- Program Pendidikan Anak Usia, Dini (PAUD & Taman Kanak-Kanak)
- Pendidikan Yang Bermutu Murah dan Ter angkau

2. Kebijakan dan Program Kesehatan

- Pelayanan Kesehatan yang bermutu, marsh dan ter angkau berupa
- Pelayanan Gratis bagi orang yang tidak mampu dengan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan yang menyeluruh (Asuransi Kesehatan)
- Peningkatan Program Posyandu yang menjadi program kesehatan bagian sistem jaminan kesehatan (di biayai dari Anggaran Kesehatan)

3. Kebijakan dan Program Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

- Dengan mendirikan Industri berbasis unggulan daerah dan padat karya
- Program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM)

4. Peningkatan mutu dan kualitas pasar tradisional dan penyediaan fasilitas ber ualan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL)

5. Peningkatan keter angkauan pemodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan skema kredit bunga, rendah dari Lembaga Penjaminan Kredit Daerah di sertai pendampingan menejemen usaha sejak dari hula sampai hilir.

6. Kebijakan dan Program Peningkatan Infrastruktur Perkotaan

- Jalan
- Drainase
- Air Bersih
- Kebersihan

7. Program Peningkatan Fasilitas Pelayanan Publik

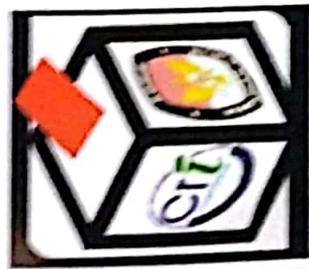
- Peningkatan pelayanan publik di sektor pemerintahan antara lain KTP, KK
- Peningkatan Pelayanan yang mullah, cepat dan akurat.

8. Program Peningkatan Kiner a dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah.

9. Peningkatan Program Pembinaan Pemuda.

- Peningkatan pembinaan di bidang olah raga baik dibidang Prestasi maupun Masyarakat.

10. Peningkatan program pembinaan di bidang Agama, Kebangsaan, dan ketertiban bermasyarakat



Perhitungan Cepat Hasil Pilkada

Perhitungan Cepat Hasil Pilkada adalah sebuah metode penghitungan cepat perungutan suara dalam sebuah Pemilihan Kecamatan (Pilkada) atau Pemilihan Umum (Pemilu). Perhitungan Cepat Hasil Pilkada berbeda dengan *exit poll*. Sebagai *exit poll* mengaiting informasi dengan metode jajak pendapat. Sedangkan Perhitungan Cepat Hasil Pilkada yang dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini menggunakan teknologi sekolika dan setiap lokasi perungutan suara secara langsung.

Cara kerjanya di setiap Tempat Perungutan Suara (TPS) ada seorang petugas yang mencatat hasil perolehan suara.

KOMISI
PEMILIHAN UMUM
PONTIANAK

TPS SUARA

TPS MASUK

872 (100,00%)
BELUM
JUMLAH
672

Perhitungan Suara

Grafik Statistik

Grafik Prosentase

Klik tombol berikut untuk pemutakhiran otomatis

| PONTIANAK | No RECAMATAN | JUMLAH TPS | HADE | OPAMA | DUTA | SIIP | HARKAD | GHESIT | SetiKawan | TIDAK SAH |
|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| | 1 | 154 | 1882 | 8043 | 4368 | 8147 | 7539 | 8607 | 1235 | 727 |
| | 2 | 80 | 1836 | 2535 | 3681 | 4563 | 1796 | 3151 | 717 | 285 |
| | 3 | 116 | 3680 | 1362 | 5133 | 14528 | 3028 | 4987 | 2816 | 670 |
| | 4 | 186 | 4280 | 2818 | 5355 | 25391 | 6800 | 7867 | 3059 | 943 |
| | 5 | 178 | 3891 | 4188 | 7127 | 15884 | 6778 | 9788 | 2320 | 989 |
| | 6 | 180 | 1975 | 2860 | 2639 | 15370 | 11487 | 14180 | 2550 | 1032 |
| | TOTAL | 872 | 17734 | 18606 | 28293 | 84883 | 36428 | 48600 | 12497 | 4646 |

21.01 TPS 009 SUKANTAN TENGGARA - PONTIANAK UTARA

(1) 6 (0) 12 (0) 6 (0) 107 (0) 66 (0) 73 (0) 16 (0) 12

20.07 TPS 002 BENUA MELAYU BARAT - PONTIANAK SELATAN

(1) 28 (0) 24 (0) 45 (0) 66 (0) 19 (0) 81 (1) 10 (0) 3

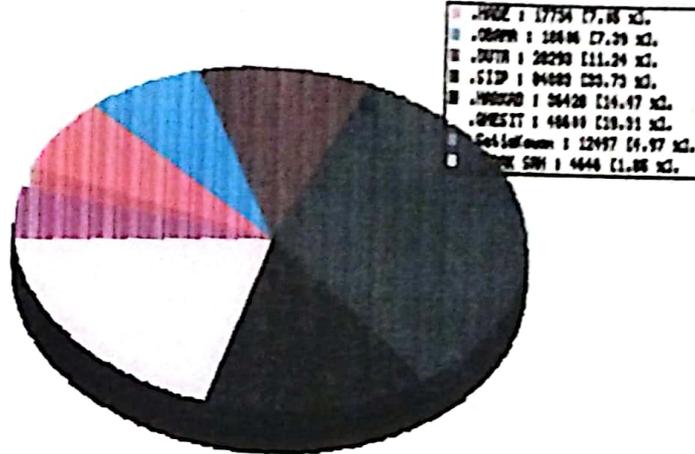
20.14 TPS 008 PANGKA BELITUNG LAUT - PONTIANAK TENGGARA

(1) 23 (0) 65 (0) 41 (0) 87 (0) 26 (0) 34 (1) 7 (0) 2

20.11 TPS 008 SUNGAI BANGKONG - PONTIANAK KOTA

DATA TERTAMPIL MERUPAKAN DATA PERHITUNGAN CEPAT HASIL PILWAKO DAN DIPERBAHARUI SECARA BERKELANJUTAN

Distribusi Perolehan Suara Pilkada PONTIANAK



DATA TERTAMPIL MERUPAKAN DATA PERHITUNGAN CEPAT HASIL
PILWAKO DAN DIPERBAHARUI SECARA BERKELANJUTAN



© Combine Resource Institution 2008

[Disclaimer](#)

[Tentang Info-Pilkada.org](#)

[Login](#)